



PENGADILAN TINGGI PADANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2022



PIMPINAN



Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	19560620 198503 1003
Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan	:	S3 – Universitas Jayabaya
Tempat/ Tgl Lahir	:	Medan, 20 Juni 1956

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	19621220 198612 1001
Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan	:	S2 – Universitas Sriwijaya
Tempat / Tgl Lahir	:	Palembang, 20 Desember 1962

HAKIM TINGGI



1. DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
2. H AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
3. H. ASMUDDIN, S.H., M.H.
4. YULMAN, S.H., M.H.
5. PETRIYANTI, S.H., M.H.
6. INANG KASMAWATI, S.H.
7. SYAIFONI, S.H., M.Hum.
8. MASRIMAL, S.H.
9. INRAWALDI, S.H., M.H.
10. H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.
11. ASMAR, S.H., M.H.
12. SUKMAYANTI, S.H., M.H.
13. RETNO PURWANDARI L, S.H., M.H.
14. CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.
15. WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.
16. MASRIZAL, S.H., M.H.
17. RITA ELSY, S.H., M.H.

HAKIM ADHOC TIPIKOR

18. H. FIRDAUS, S.H., M.Hum.
19. LENDRAWATI, S.H., M.Hum.
20. AHMAD DENDY SYAIFULLAH, S.H., M.H.

PANITERA & SEKRETARIS



RINA PERTIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	196412031991032003
Golongan	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan	:	S2 – UPN Veteran Jakarta
Tempat / Tgl Lahir	:	Bandung, 03 Desember 1964

ENDRI NOVIAN, S.E.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	19751109 200312 1001
Golongan	:	Pembina tingkat 1 (IV/b)
Pendidikan	:	S1 - UNB
Tempat / Tgl Lahir	:	Bogor, 09 november 1975

KEPANITERAAN



1. **PANMUD PERDATA** *INDRA SAKTI, S.H.*
2. **PLT.PANMUD PIDANA** *TUTIK TURYANAWATI,S.H.,M.H*
3. **PANMUD TIPIKOR** *NELDAWATI, S.H.*
4. **PLT.PANMUD HUKUM** *EMMY JEFRIATI,S.H.*

KESEKRETARIATAN



Kabag. Umum Dan Keuangan

BUDIMAN, S.H.

Kabag. Perencanaan Dan Kepegawaian

ADE CANDRA, S.H.

Kasubag. Tata Usaha Dan Rumah Tangga

RENGGA SATRIA, S.Kom.

Plt. Kasubag. Rencana Program Dan Anggaran

AZNEL MAHENDRA, S.Si., M.H.

Kasubag. Keuangan Dan Pelaporan

NOVITA SARI, S.Kom.

Kasubag. Kepegawaian Dan IT

AYU DAVMAYANTI, S.H.

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari seluruh Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/ 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan ini sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja. Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam tahun 2022. Dalam laporan ini telah tertuang kinerja utama dengan didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan sekaligus merupakan evaluasi bagi Pengadilan Tinggi Padang. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Semoga laporan ini dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan kami sajikan dan kami juga berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Mahkamah Agung RI.

Padang, Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

Pimpinan.....	i
Hakim Tinggi.....	ii
Panitera dan Sekretaris.....	iii
Kepaniteraan	iv
Kesekretariatan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Keadaan Perkara	8
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang	9
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Padang	10
• Jumlah sisa perkara yang diputus	10
• Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	11
• Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi, PK.....	12
• Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi	15
• Jumlah perkara perdata yang berhasil diversi	16
C. Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu	17
• Posbakum	17
• Sidang keliling/Pelayanan Terpadu	18
• Perkara Prodeo	18
BAB III Sumber Daya Manusia	17
A. Mutasi	18
B. Promosi	12
C. Pensiun	31
D. Diklat (SDM teknis dan Non teknis)	31
BAB IV Pengelolaan Keuangan, sarana Prasarana dan Teknologi Informasi ...	61
A. Pengelolaan Keuangan	61
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	64
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	126
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	130
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	130
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	133

C. Inovasi Pelayanan Publik	135
BAB VI Pengawasan	170
A. Internal	171
B. Evaluasi	196
BAB VII Penutup	199
A. Kesimpulan	199
B. Saran	199

BAB I PENDAHULUAN

A.PROFIL PENGADILAN TINGGI PADANG



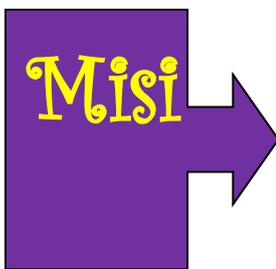
Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi Bertype A di Indonesia. Terletak pada Ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Padang mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, juga mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

B.VISI & MISI PENGADILAN TINGGI PADANG



"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG"



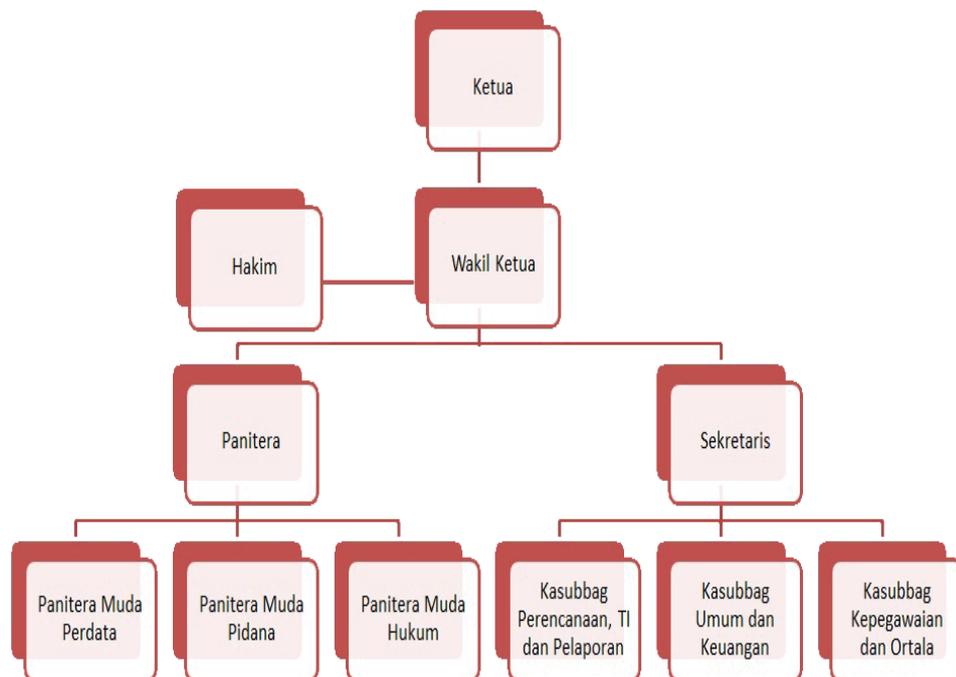
- 1)Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang;*
- 2)Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;*
- 3)Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang;*
- 4)Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang;*

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri



D. YURISDIKSI/WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG





FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING



FARATONY, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT



LILI EVELIN, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG



AHMAD ZULPIKAR, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH



ADEK NURHADI S.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI



DHARMA SETIAWAN, S.H., C.N.
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU



RADEN DANANG HOOR KUSUMO, S.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK



ARSUL HIDAYAT, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO



DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO



Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



HANIFZAR, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR



PURNOMO WIBOWO, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

BAB II

KEADAAN PERKARA PENGADILAN TINGGI PADANG

Laporan ini merupakan hasil dari implementasi pengukuran kinerja selama tahun 2022. Memuat pertanggung jawaban atas keberhasilan dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan perencanaan, serta target yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2022 adalah rata-rata telah mencapai target terutama pada indikator Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu perkara yang diterima ataupun yang masuk pada Pengadilan Tinggi Padang dan seluruh Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat terdapat **64.073** perkara, sementara sisa pada awal tahun 2021 sejumlah **873** perkara. Kemudian perkara yang diterima dengan sisa tersebut menjadi beban kinerja selama tahun 2022 berjumlah **64.946** perkara. Namun diputus atau diselesaikan sejumlah **63.891** perkara, sehingga terdapat sisa pada akhir tahun adalah **1.055** perkara. Dapat disimpulkan pada tahun 2022 capaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang mencapai **97%**. Dapat dilihat pada tabel keadaan perkara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut:

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang dan se-Wilayah Hukumnya yaitu:

No	Pengadilan	Sisa 2021	Perkara Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa	Capaian Memutus
	Pengadilan Tinggi Padang	40	574	614	544	70	88%
1	Pengadilan Negeri Padang	256	24.647	24.903	24.486	417	98%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	93	8.527	8.620	8.468	152	98%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	55	3.053	3.108	3.044	64	97%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	4	579	583	574	9	98%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	27	1.998	2.025	1.989	36	98%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	11	2.203	2.214	2.192	22	99%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	21	2.840	2.861	2.827	34	98%
8	Pengadilan Negeri Solok	25	3.240	3.265	3.247	18	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	179	3.038	3.217	3.157	60	98%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	9	2.120	2.129	2.128	1	99%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	33	1.857	1.890	1.856	34	98%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	7	1.248	1.255	1.242	13	99%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	34	3.645	3.679	3.626	53	98%
14	Pengadilan Negeri Muaro	16	1.522	1.538	1.516	22	98%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	36	2.086	2.122	2.104	18	99%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	27	896	923	891	32	96%
	Total	873	64.073	64.946	63.891	1.055	98%

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Tahun 2021 Putus Tahun 2022

NO	PENGADILAN	SISA PERKARA TAHUN 2021	DIPUTUS TAHUN 2022	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	40	40	100%
1	Pengadilan Negeri Padang	256	256	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	93	93	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	55	55	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	4	4	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	27	27	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	11	11	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	21	21	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	25	25	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	179	179	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	9	9	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	33	33	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	7	7	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	34	34	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	16	16	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	36	36	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	27	27	100%
	Total	873	873	100%

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

No	Pengadilan	Beban	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Jumlah Putus	Capaian
	Pengadilan Tinggi Padang	614	544	-	544	100%
1	Pengadilan Negeri Padang	24.903	24.363	123	24.486	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	8.620	8.417	51	8.468	98%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	3.108	3.022	22	3.044	99%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	583	573	1	574	99%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2.025	1.980	9	1.989	99%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2.214	2.192	-	2.192	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2.861	2.820	7	2.827	99%
8	Pengadilan Negeri Solok	3.265	3.231	16	3.247	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	3.217	3.117	40	3.157	98%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2.129	2.125	3	2.128	99%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1.890	1.856	-	1.856	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1.255	1.241	1	1.242	99%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	3.679	3.617	9	3.626	99%
14	Pengadilan Negeri Muaro	1.538	1.516	-	1.516	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2.122	2.094	10	2.104	99%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	923	890	1	891	99%
Total		64.946	63.598	293	63.891	99%

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
a. Yang Tidak Mengajukan Banding

NO	PENGADILAN	PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	24.486	149	24.337	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	8.468	64	8.404	99%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	3.044	47	2.997	98%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	574	11	563	99%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1.986	63	1.923	96%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2.192	19	2.173	99%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2.827	33	2.794	98%
8	Pengadilan Negeri Solok	3.247	27	3.220	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	3.157	38	3.119	98%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2.128	5	2.123	99%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1.856	28	1.828	99%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1.242	29	1.213	98%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	3.626	55	3.571	98%
14	Pengadilan Negeri Muaro	1.516	14	1.502	99%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2.104	32	2.072	98%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	891	22	869	97%
Total		63.891	636	63.255	99%

b. Yang Tidak Mengajukan Kasasi

NO	PENGADILAN	PUTUS	KASASI	TIDAK KASASI	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	133	98	66	49%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	32	21	11	34%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	44	27	17	67%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	5	3	2	40%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	63	37	26	41%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	20	9	11	55%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	34	22	12	35%
8	Pengadilan Negeri Solok	23	10	13	56%
9	Pengadilan Negeri Painan	33	20	13	39%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	2	1	33%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	19	9	10	52%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	26	13	13	50%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	46	25	21	45%
14	Pengadilan Negeri Muaro	14	4	10	71%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	22	13	9	40%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	17	8	9	52%
Total		534	321	244	

c. Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

NO	PENGADILAN	PUTUS	PK	TIDAK PK	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	98	2	96	97%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	11	5	6	54%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	27	-	27	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	9	1	8	66%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	29	5	24	82%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4	2	2	50%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	15	1	14	93%
8	Pengadilan Negeri Solok	5	1	4	80%
9	Pengadilan Negeri Painan	7	0	7	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	1	2	66%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	7	1	6	85%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	14	-	14	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	41	1	40	97%
14	Pengadilan Negeri Muaro	4	-	4	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	13	5	8	61%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	7	-	7	100
Total		294	25	269	

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara perdata tahun 2022 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan mediasi dan berhasil melalui mediasi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk	Jumlah Yang Berhasil Di Mediasi	Jumlah Yang Tidak Berhasil Di Mediasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Padang	166	6	160	4%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	117	7	109	6%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	68	55	13	80%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	5	1	4	20%
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	42	4	38	10%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	67	2	65	2%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	35	2	33	5%
8	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	20	1	19	5%
9	Pengadilan Negeri Batusangkar	38	1	37	2%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	8	5	3	62%
11	Pengadilan Negeri Solok	25	2	23	8%
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	51	3	48	6%
13	Pengadilan Negeri Muaro	40	10	30	25%
14	Pengadilan Negeri Painan	48	0	48	0%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	32	3	29	9%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	38	12	16	31%
	TOTAL	875	114	761	13%

5. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diversi

Jumlah perkara anak tahun 2022 pada Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan diversi dan berhasil melalui diversi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Anak Yang Masuk	Jumlah Yang Berhasil Diversi	Jumlah Yang Tidak Berhasil Diversi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Padang	54	2	52	3%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	11	2	9	18%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	11	1	10	9%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	7	1	6	14%
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	9	2	7	22%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	8	1	7	12%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	7	1	6	14%
8	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2	0	2	0%
9	Pengadilan Negeri Batusangkar	9	2	7	22%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	3	2	1	66%
11	Pengadilan Negeri Solok	10	7	3	70%
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	10	2	8	20%
13	Pengadilan Negeri Muaro	6	1	5	16%
14	Pengadilan Negeri Painan	7	0	7	0%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	2	2	50%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-
	Total	158	26	132	16%

C. Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. POSBAKUM

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	43.200.000	43.200.000	-	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	24.000.000	24.000.000	-	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	38.400.000	38.400.000	-	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	24.000.000	24.000.000	-	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	24.000.000	24.000.000	-	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	19.200.000	19.200.000	-	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	24.000.000	24.000.000	-	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	19.200.000	19.200.000	-	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	24.000.000	24.000.000	-	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	19.200.000	19.200.000	-	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	24.000.000	24.000.000	-	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	24.000.000	24.000.000	-	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	24.000.000	24.000.000	-	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	21.600.000	21.600.000	-	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	24.000.000	24.000.000	-	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	24.000.000	24.000.000	-	100%
Total		400.800.000	400.800.000		100%

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang				
1	Pengadilan Negeri Padang	-	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	-	-	-
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-	-	-
8	Pengadilan Negeri Solok	-	-	-	-
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-	-	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	-	-	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	-	-	-	-
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	89.500.000	88.840.000	660.000	99%
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	158.000.000	157.960.000	-	99%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-
	Total	247.500.000	246.800.000	660.000	

3. PRODEO

Tidak ada anggaran untuk prodeo di dalam DIPA masing-masing satker.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pengadilan	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Kepaniteraan						Keseekretariatan				Ket
					Panitera	Panmud	PP	JS	JSP	Staff	Sekretaris	Kasub	Staf	PPNPN	
	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	18	1	2	21	-	-	9	1	4	13	20	Kabag 2 Orang
1	Pengadilan Negeri Padang	1	1	16	1	5	12	4	12	5	1	3	8	19	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	7	1	3	5	3	1	5	1	3	9	8	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	7	1	3	5	5	-	5	1	2	10	11	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	1	4	1	2	-	1	1	4	1	2	2	12	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	7	1	3	4	1	2	5	1	3	3	10	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	-	6	1	3	1	3	-	4	1	3	4	9	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	-	6	1	3	3		2	4	1	3	3	10	
8	Pengadilan Negeri Solok	1	1	6	1	3	1	1	1	5	1	2	3	10	
9	Pengadilan Negeri Painan	1	-	5	1	2	1	1	-	6	1	3	3	-	

10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	4	1	3	2	2	-	5	1	3	5	8	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	-	7	1	3	2	2	1	3	1	3	3	10	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	-	3	1	3	2	1	3	-	1	3	8	9	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	6	1	2	3	2	-	5	1	3	4	10	
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	-	3	1	3	3	-	2	4	1	3	3	9	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	-	6	1	3	-	1	-	5	-	3	5	9	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	-	6	1	1	2	1	-	6	1	3	3	8	
Total		14	10	117	16	47	67	28	25	80	15	49	89	172	

A. MUTASI

NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	2	1	
1	Pengadilan Negeri Padang	17	12	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	2	1	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	10	1	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	7	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	8	1	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	1	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	3	4	
8	Pengadilan Negeri Solok	3	4	
9	Pengadilan Negeri Painan	2	4	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	5	5	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	-	4	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	3	2	
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	2	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	10	5	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	-	
	Total	70	55	

B. PROMOSI

NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	3	1	
1	Pengadilan Negeri Padang	5	10	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	8	5	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	1	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	4	-	Promosi Internal
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	6	2	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2	1	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2	3	
8	Pengadilan Negeri Solok	4	1	
9	Pengadilan Negeri Painan	8	-	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	-	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	2	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	2	2	
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	-	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	5	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	2	
	Total	52	36	

C. PENSUN

NO	PENGADILAN	JABATAN	JUMLAH
	Pengadilan Tinggi Padang	Hakim Tinggi: 2 Panitera Muda Pidana: 1 Panitera Muda Hukum : 1 Panitera Pengganti: 5	9
1	Pengadilan Negeri Padang	Panitera Pengganti	2
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Panitera Pengganti, Kasub Kepegawaian dan Ortala	2
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Juru Sita Pengganti, Panitera Pengganti, Sekretaris	3
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Panitera Pengganti	1
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-
8	Pengadilan Negeri Solok	Panitera Pengganti	1
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	Panitera Pengganti	1
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Panitera Pengganti	1
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	-	-
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	Panitera Pengganti	1
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	-
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-
Total			21

D. Diklat

1. Diklat Teknis

1) Pengadilan Negeri Padang

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Said Hamrizal Zulfi, S.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	27 hari
2.	Arniyetti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
3.	Harry Yurino, S.H	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
4.	Jon Hendri, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
5.	Mainidar, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
6.	Marhaban, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
7.	M. Yusuf, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
8.	Maiyusra, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari

9.	Musinah, S.H	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
10.	Rimson Situmorang, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
11.	Sri Hartini, S.Sos.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
12.	Rosteti Novalara, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
13.	Yenni Mariami, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
14.	Windagustina, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
15.	Syamsuardi, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
16.	Wahyuni Sari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
17.	Vivi Raswaty, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
18.	Yulizar, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari

19.	Syafril, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
20.	M. Teguh, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti dengan metode pembelajaran jarak jauh	32 hari
21.	M. Ismail Gunawan, S.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVI bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Metode Pembelajaran <i>Blended Learning</i> Seluruh Indonesia	50 Hari
22.	Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Peradilan Umum dan Pengadilan Agama dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh	50 Hari
23.	M. Teguh, S.E., S.H., M.H.	Panitera	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	12 Hari
24.	Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III	13 Hari
25.	M. Teguh, S.E., S.H., M.H.	Panitera	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III	13 Hari

26.	Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia yang akan dilakukan secara Blanded Learning	27 Hari
27.	Syamsuardi, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXIV bagi calon Hakim Ad Hoc.	13 Hari
Total			27	ORANG

2) Pengadilan Negeri Pariaman

	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Afdil Azizi, S.H, M.Kn	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemarkitiman	200 Jam
	Afdil Azizi, S.H, M.Kn	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan	120 Jam
	Afdil Azizi, S.H, M.Kn	Hakim	Lokakarya Perlindungan Lingkungan Dan Perubahan Iklim	24 Jam
	Zulfadly, S.H., M.H	Wakil Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	96 Jam
	Nurmaidaris, S.H	Panitera	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	96 Jam
	Zulfadly, S.H., M.H	Wakil Ketua	Bimbingan Teknis Asn Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	24 Jam
	Nurmaidaris, S.H	Panitera	Bimbingan Teknis Asn Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	24 Jam
	Desmawati, S..H	Panmud Perdata	Bimbingan Teknis Asn Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	24 Jam
	Devi Yanti, S.H M.H	Panmud Pidana	Bimbingan Teknis Asn Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	24 Jam
	Hazia, A.Md	Jsp	Bimbingan Teknis Asn Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	24 Jam
	Muhammad Affan, S.H., M.H	Hakim	Mengikuti Tot Pelatihan Terpadu Sppa	48 Jam
	Syofianita, S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan Xvi Tahun 2022	88 Jam

3) Pengadilan Negeri Bukittinggi

NO	NAMA	JABATAN	MENGIKUTI DIKLAT	WAKTU
1	Lukman Nulhakim, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	31 Jan - 11 Feb 2022 & 13 - 26 Feb 2022
			Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan bagi Hakim Peradilan Umum dan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan	18 Ags - 30 Sep 2022
2	Astini	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	15 - 17 Mar 2022
3	Faizal	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	22 -23 Mar 2022
4	Indra Satria Putra, S.H., M.H.	Panitera	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	29 - 31 Mar 2022
			Pelatihan Teknis Yudisial eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum	3 Juni 2022
			Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni - 1 Juli 2022
			Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III Tahap I (Pembelajaran Mandiri E-Learning)	25 - 30 Juli 2022
5	Helmiyetti. K	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	29 - 31 Maret 2022
6	Meiyenti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	5 - 7 April 2022
7	Rini Fitri, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	12 - 14 April 2022
			Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni - 1 Juli 2022
8	H. Supardi, S.H	Panitera Muda Pidana	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	12 - 14 April 2022
			Bimbingan Teknis ASN terkait	29 Juni - 1 Juli 2022

			Percepatan Penyelesaian Perkara	
9	Sesmayetti	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	12 - 14 April 2022
10	Witridayanti 19700417 199203 2 004	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	19 - 21 April 2022
11	Muhammad Irsyad, S.H., M.H. 19771110 200112 1 003	Wakil Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	18 April - 13 Mei 2022
			Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni - 1 Juli 2022
12	Supardi, S.H., M.H. 19710125 199303 1 005	Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum	3 Juni 2022
			Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III Tahap I (Pembelajaran Mandiri E-Learning)	25 - 30 Juli 2022
13	ANDAYANI 197900519 199103 2 002	Jurusita	Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni - 1 Juli 2022

4) Pengadilan Negeri Sawahlunto

No	SDM Yang Mengikuti Diklat	Nama Diklat	Waktu
1.	Muhammad Hibrian, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata Bagi hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	80 jam
2.	Muhammad Hibrian, S.H.	Pelatihan Teknis Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2022	80 jam
3.	Muhammad Hibrian, S.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Karir dan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	126 jam
4.	Muhammad Hibrian, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Eksekusi pada SIPP secara daring	1 hari
5.	- Tari Mentalia, S.H. - Effendi, S.H. - Suhendri Yasdi, S.H. - Sarman, S.H. - Sisca Utama	Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara T.A. 2022 sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 hari
6.	- Shinta Viliasary, S.H - Suyono, S.H - Sisca Utama - Erman, S.H.	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian Tahun 2022 sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 hari
7.	Efendi, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	5 hari

5) Pengadilan Negeri Payakumbuh

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XVI Tahap 1 Tahap II Tahap III - Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu. Tahap I Tahap II - Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia. Tahap I Tahap II 	<ul style="list-style-type: none"> 11 s/d 22 April 2022 9 s/d 18 Mei 2022 22 s/d 31 Mei 2022 6 s/d 10 Juni 2022 13 s/d 17 Juni 2022 21 s/d 25 Maret 2022 28 Maret s/d 5 April 2022
2	M. Rizky Subardy, SH	Hakim	Pelatihan Teknis bersama APH Perkara Tindak Pidana Perpajakan	18 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022

6) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H	Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	80 Jam
2	Misbahul Anwar, SH, MH	Hakim	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung 2045	75 Jam
3	Kamaruddin Manulang, S.Kom	Pranata Komputer	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Golongan III Angkatan Is.d XIV 2022	647 Jam
4	Afiatun Prihatingrum, A.Md.A.B	Arsiparis	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan Is.d XIV 2022	647 Jam
5	Muhammad Luthfi Said, SH	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I dan II Tahun 2022	647 Jam
6	Rani Adriana, SH	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I dan II Tahun 2022	647 Jam
7	Rahmatul Khusni, A.Md	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III dan IV Tahun 2022	647 Jam
8	Ratih Purwasih, A.Md.A.B	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III dan IV Tahun 2022	647 Jam
Total		8 Orang		

7) Pengadilan Negeri Batusangkar

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Hari Rahma, SH	Hakim	Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan	15.s.d 22 September 2022
2	Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H	Hakim	Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022
3	Syahrial Sadar, S.H	Panmud Pidana	Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022
4	Syharil	Juru Sita	Percepatan Penyelesaian Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022

8) Pengadilan Negeri Solok

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Agustina	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	15 s.d. 17 Mar 2022
2.	Syalfetri, S.H.	Panitera	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d. 21 Apr 2022
3.	Yeri Fitriani, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d. 21 Apr 2022
4.	Zarmaini	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d. 21 Apr 2022
5.	Yustika Rini	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d. 21 Apr 2022
6.	Ismed, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	29 s.d. 31 Mar 2022

7.	Syalfferri, S.H.	Panitera	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	13 s.d. 17 Jun 2022
8.	Raden Danang Noor Kusumo, S.H.	Ketua	Pembinaan Teknis Yudisial Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang TA 2022	22 s.d. 23 Mei 2022
9.	Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2022 se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Jun s.d. 1 Jul 2022
10.	Syalfferri, S.H.	Panitera	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Jun s.d. 1 Jul 2022
11.	Ismed, S.H.	Panitera Muda Perdata	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Jun s.d. 1 Jul 2022
12.	Isyanti, S.H.	Panitera Muda Pidana	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Jun s.d. 1 Jul 2022

13.	Mawardi	Jurusita	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Jun s.d. 1 Jul 2022
14.	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III	25 s.d. 30 Jul 2022
15.	Raden Danang Noor Kusumo, S.H.	Ketua	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
16.	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
17.	Syalferri, S.H.	Panitera	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
18.	Ismed, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
19.	Isyanti, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
20.	Mawardi	Jurusita	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022
21.	Thariq Al Fayen, S.H.	CPNS	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d. 9 Des 2022

9) Pengadilan Negeri Painan

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Fadlia. S, S.E	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Bimtek Kepegawai & Keuangan	3 Hari
2	Armeita Yanda, S.E	Kasubbag Umum & Keuangan	Bimtek Kepegawai & Keuangan	3 Hari
3	Dr. Riya Novita, S.H., M.H	Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	14 Hari
4	Doni Eka Putra, S.H., M.H	Panitera	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	14 Hari
5	Fadlia. S, S.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Manajemen Asn	14 Hari
6	Apriliana Rizki Nur Lestari, A.Md	Arsiparis	Diklat Arsiparis	2 Bulan
7	Putri Suci Amanda, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Latsar Cpns Gol III	3 Bulan
8	Krisdobby Riyanto Tumanggor, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Latsar Cpns Gol III	3 Bulan
9	Yovan Adhiyaksa, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Latsar Cpns Gol III	3 Bulan
10	Ulfia Hasni, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	Latsar Cpns Gol II	3 Bulan
11	Mutia Nurul Zaini, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	Latsar Cpns Gol II	3 Bulan

10) Pengadilan Negeri Padang Panjang

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Lili Evelin, S.H., M.H.	Ketua	SPPA – TOT	20-11-2022 s.d 25-11-2022
2	Yusrita, S.H	Panitera	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
3	Maiza Mukhlis, S.H	Panmud Perdata	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
4	Ade Zola Rezki, S.H	Panmud Hukum	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
5	Arisqi Gusmalayanti, S.H	Panmud Pidana	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
6	Jeni Efendi	Panitera Pengganti	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
7	Nilahayati	Panitera Pengganti	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022
8	Zarnelis	Panitera Pengganti	Diklat Panitera Pengganti	17-03-2022 s.d 25-05-2022

11) Pengadilan Negeri Lubuk Basung

No	Nama	Jabatan	Jenis Diklat
1	Miftahussalam	Kasubbag Ptip	ECSCS
2	Yoshito Siburian, Sh	Hakim	diklat Audit For Non Auditor dan Penyelenggaraan Reformasi Birokasi dari Pusdiklatwas BPKP Pelatihan Persiapan Beasiswa Ke Luar Negeri Tahun 2022 Teknis Pelatihan terkait Akses Perempuan terhadap Keadilan Dengan Mitra ICJ
3	Siska Naomi Panggabean		Diklat Teknis Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE) 1 Peradilan Umum

12) Pengadilan Negeri Tanjung Pati

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Muhammad Chandra, SH.MH	Ketua	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN, dan Kepegawaian	23 Februari 2022
2	Lingga Febriyanti, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan		23 s.d 25 Februari 2022
3	Firman Hakim, S.KOM	Kasubbag PTIP		
4	Deska Rina, S.KOM	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala		
5	Aulia Alfacrisy, S.H	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti secara E-Learning dan Online Class Via Zoom Meeting	15 s.d 17 Maret 2022
6	Jafri Zen, S.H.	Panitera		29 s.d 31 Maret 2022
7	Linda Bestari	Panitera Pengganti		
8	Infatrizal	Panitera Pengganti		
9	Rismarta, S.H.	Panitera Muda Pidana		12 s.d 14 April 2022
10	Zubir	Panitera Muda Perdata		19 s.d 21 April 2022
11	Zulhelmi	Panitera Pengganti		
12	Muhammad Chandra, Sh.Mh	Ketua	Pelatihan dan Pembinaan Teknis Yudisial	22 s.d 23 Mei 2022
13	Ivan Hamonangan Sianipar, SH	Hakim		
14	Deska Rina, S.KOM	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sosialisasi End User Training (EUT) SAKTI Modul Pelaporan	6 Juni 2022
15	Andira Mardhiah, S.KOM	Jurusita Pengganti		
16	Rahma Yani, A.MD	CPNS Pengelola Perkara		
17	Jafri Zen, S.H	Panitera	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata	13 s.d 17 Juni 2022
18	Lingga Febriyanti, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Pelaporan Data Caput SAKTI	23 Juni 2022
19	Rahma Yani, A.MD	CPNS Pengelola Perkara		
20	Adek Nurhadi, S.H.	Ketua	Bimbingan Teknis ASN Terkait Percepatan	29 Juni s.d 1 Juli 2022
21	Jafri Zen, S.H.	Panitera		
22	Zubir	Panitera Muda Perdata		

23	Rismarta, S.H.	Panitera Muda Pidana	Penyelesaian Perkara	
24	Andira Mardhiah, S.KOM	Jurusita Pengganti		
25	Lingga Febriyanti, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	E-Learning Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)	25 Juli s.d 5 Agustus 2022
26	Adek Nurhadi, S.H.	Ketua	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	23 Agustus 2022
27	Erick Andhika, SH.,M.KN	Hakim		
28	Henki Sitanggang, S.H.	Hakim		
29	Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.	Hakim		
30	Jafri Zen, S.H.	Panitera		
31	Supituarman, S.E.	Sekretaris		
32	Adek Nurhadi, S.H.	Ketua	Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU)	14 September 2022
33	Jafri Zen, S.H.	Panitera		
34	Rismarta, S.H.	Panitera Muda Pidana		
35	Firman Hakim, S.KOM	Kasubbag PTIP		
36	Martogi, S.KOM	Prakom Ahli Pertama		
37	Supituarman, S.E	Sekretaris	Sosialisasi JDIH v2 secara <i>online</i>	29 September 2022
38	Firman Hakim, S.KOM	Kasubbag PTIP		
39	Deska Rina, S.KOM	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala		
40	Martogi, S.KOM	Prakom Ahli Pertama		
41	Elisa, A.MD.S.I	Arsiparis pelaksana	Webinar Wisata Arsip Virtual	19 September 2022
42	Jafri Zen, S.H.	Panitera	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	20 Oktober 2022
43	Supituarman, S.E.	Sekretaris		
44	Deska Rina, S.KOM	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala		
45	Kurniati, S.H.	Jurusita Pengganti		
46	Lingga Febriyanti, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Online BMN	31 Oktober 2022 s.d 04 November 2022
47	Deska Rina, S.KOM	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Coaching Clinic Penyusunan SKP	24 November 2022
48	Elisa, A.MD.S.I	Arsiparis pelaksana		
49	Adek Nurhadi, S.H	Ketua		

			Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
50	Erick Andhika, SH.,M.KN	Hakim		
51	Zubir	Panitera Muda Perdata		
52	Rismarta, S.H	Panitera Muda Pidana		
53	Kurniati, S.H	Jurusita Pengganti		
54	Putri Ayu Mardhiyah, S.T	PPNPN		

13) Pengadilan Negeri Koto Baru

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	M.Retza Billiansyah, S.H	Hakim	Pelatihan Berkelanjutan	1-Maret-2022 s/d 14-Maret-2022
2	Awaludin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos	Wakil	Diklat Teknis Arsip Dinamis	8-Maret-2022 s/d 11-Maret-22
3	Azizur Rahim, S.H	PP	Pelatihan Singkat PP	15-Maret-2022 s/d 17-Maret-22
4	Ayu Maulani, S.H	PP	Pelatihan Singkat PP	15-Maret-2022 s/d 17-Maret-22
5	Muslim	Panmud Perdata	Pelatihan Singkat PP	5-April-2022 s/d 7-April-2022
6	Putri Diana Juita, S.H	Panmud Hk	Pelatihan Singkat PP	5-April-2022 s/d 7-April-2022
7	Nelly Saadah	PP	Pelatihan Singkat PP	5-April-2022 s/d 7-April-2022
8	Zulkifli, S.H.	Panitera	Pelatihan Singkat PP	19-April-2022 s/d 21-April-2022
9	Trioka Saputra, S.H	Panmud Pid	Pelatihan Singkat PP	19-April-2022 s/d 21-April-2022
10	Tati Sulastrri	PP	Pelatihan Singkat PP	19-April-2022 s/d 21-April-2022
Total Diklat Teknis		10 orang		

14) Pengadilan Negeri Muaro

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Arsul Hidayat, SH., MH	Ketua PN Muaro	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	6 s.d 10 Juni 2022 (Belajar Mandiri) 13 s.d 17 Juni 2022 (Klasikal)
			Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
2.	Fernando Imanuel, SH	Hakim PN Muaro	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
3.	Ricky Handiko Putra, SH	Panitera PN Muaro	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi padang, Medan, Pekanbaru dan Bengkulu	6 s.d. 10 Juni 2022
			Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	12 s.d 14 April 2022
			Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
4.	Wahyudi, SH	Panitera Muda Perdata PN Muaro	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d 21 April 2021
			Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
5.	Muhamad Ihsan, SH	Panitera Muda	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	5 s.d 7 April 2022

		Pidana PN Muaro	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
6.	Rahmina Rindani, S.IP.,MH	Panitera Pengganti PN Muaro	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	5 s.d 7 April 2022
			Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
7.	Robby Agung Anugrah, SH	Panitera Pengganti PN Muaro	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	12 s.d 14 April 2022
8.	Hendra Prasetyo Budi	Jurusita Pengganti PN Muaro	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoron Perkara Lingkungan Hidup	6 Desember 2022 (belajar mandiri) 9 Desember 2022 (Online)
Jumlah		8 Orang		

15) Pengadilan Negeri Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Fatarony, SH., MH.	Ketua	Pembinaan Teknis Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pdang	22 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022
2	Imam Kharisma Makkawaru, SH., MH.	Hakim	Bimbingan teknis ASN terkait percepatan penyelesaian perkara TA. 2022 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang	29 Juni 2022 s/d 1 Juli 2022
3	Arny Dewi Purnamasari, SH.	Hakim	Pelatihan Berkelanjutan bagi hakim TK. I Peradilan umum Seluruh Indonesia	1 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022
4	Warman Priatno, SH.	Panitera Muda Pidana	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata bagi hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pdang	13 Juni 2022 s/d 17 Juni 2022
5	Isyanti, SH.	Panitera Muda Perdata	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 lingkung Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022
6	Robert Wilson, SH.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 lingkung Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022

16) Pengadilan Negeri Pulau Punjung

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Purnomo Wibowo, S.H., M.H.	Ketua	Bimbingan Teknis	22 s.d 23 Mei 2022
			Pelatihan Sertifikasi Mediator	24 Oktober s.d 16 November 2022
			Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
2	Dedy Agung Prasetyo, SH	Hakim	Bimbingan Teknis Penyelesaian Percepatan Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022
3	Iqbal Lazuardi, SH	Hakim	Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
4	Fitriati, S.H.	Panitera	Bimbingan Teknis PNBP	20 Oktober 2022
5	Rini Fitri, S.H.	Panitera	Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
6	Hartati, S.H.	Sekretaris	Bimbingan Teknis PNBP	20 Oktober 2022
7	Khairul, Sh	Panitera Muda Perdata	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	24 s.d 31 Maret 2022
			Bimbingan Teknis Penyelesaian Percepatan Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022
			Pelatihan Online Penomoran Perkara	6 s.d 9 Desember
8	Yendi Martin Rudy, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	14 s.d 21 April 2022
9	Kardinal, S.T., S.H.	Kasubag PTIP	Bimbingan Teknis PNBP	20 Oktober 2022
10	Tafrioza	Panitera Pengganti	Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
			Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	14 s.d 21 April 2022
11	Rahmad Candra Eka Fahdevy, SH	Jurusita	Bimbingan Teknis Penyelesaian Percepatan Perkara	29 Juni s.d 1 Juli 2022

12	Ashabul Kahfi, S.H.I	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
13	Mazda Febriani, A.Md	Pengadministrasi Register Perkara	Pelatihan Online Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	6 s.d 9 Desember 2022
			Bimbingan Teknis PNB	20 Oktober 2022

2. Diklat Non Teknis

1) Pengadilan Negeri Padang

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Baratha Jaya Wardhana, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Diklat Training Of Trainers	5 hari
2.	Yolla Aprillia, S.Kom.	CPNS / Pranata Komputer Ahli Pertama	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i>	90 hari
3.	Viola Sekar Ayu, A.Md.MRA.	CPNS / Arsiparis Terampil	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i>	100 hari
4.	Zahara B, S.H., M.H.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 Hari
5.	Baratha Jaya W, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 Hari
6.	Endrizal, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 Hari

7.	Shafira Fanni, S.Komp.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 Hari
8.	Baratha Jaya W, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer bagi Pengajar Muatan Lokal	9 Hari
9.	Mentari Wahyudihati, S.H.	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari
10.	Mercy Monica Yolanda, S.H.	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari
11.	Yumni Nadhilah, S.H.	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari
12.	Nisrina Irbah Sati, S.H.	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari

13	Resti Septiani, A.Md., Par.	CPNS / Pengelola Perkara	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari
14	Theresia YoesePIN Ritonga, A.Md., Ak.	CPNS / Pengelola BMN	Latsar CPNS secara Blanded Learning kerjasama dengan balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Golongan III dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	97 Hari
15	Delvi Sari, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelatihan Online tentang Manajemen Barang Milik Negara Angkatan I s.d. V dari Tempat Tugas Tahun 2022	5 Hari
16	Baratha Jaya W, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pelatihan Online tentang Manajemen Barang Milik Negara Angkatan I s.d. V dari Tempat Tugas Tahun 2022	5 Hari
17	Baratha Jaya W, S.Kom., S.H., M.Kom.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pelatihan Penyusunan bahan Ajar Administrasi Umum dari Pengajar Muatan Lokal modul 1 s.d. 5	4 Hari
Total			17	ORANG

2) Pengadilan Negeri Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Fransiscus, S.Kom	Prakom Pn Pariaman	Bimbingan Teknis Dan Tindak Lanjut Implementasi Digital	8 Jam
2.	Corry Maghdalena Sirait, A.Md, A.B	Arsiparis Pelaksana	Bimtek Kearsipan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis Lingkungan Mahkamah Agung	15 Jam
3.	Corry Maghdalena Sirait, A.Md, A.B	Arsiparis Pelaksana	Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Kearsipan	21 Jam
4.	Corry Maghdalena Sirait, A.Md, A.B	Arsiparis Pelaksana	Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Kearsipan	7 Jam
5.	Oki Rusman S.H	Kasub Umum Dan Keuangan	Bimbingan Teknis Keuangan	24 Jam
6.	Rafiatri Zein, S.Kom	Kasub Ptip	Bimbingan Teknis Keuangan	24 Jam

3) Pengadilan Negeri Bukittinggi

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Firstika H Martha, S. Kom. 19920712 201503 2002	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Champion Meeting-Court Excellence Training	13 – 17 Jan 2022
			Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas MA 2045	14 – 19 Nov 2022
2	Fitri Yeni, S.H., M.H. 19780505 201101 2005	Kasubbag PTIP	Pelatihan Online Pengembangan Kapasitas bagi Fasilitator (TOT)	24 - 28 Jan 2022
			Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A. 2022	23 - 25 Feb 2022
			Pengajar Muatan Lokal Administrasi Umum pada Latsar CPNS Gelombang I Golongan III Mahkamah Agung RI	30 Mar - 21 April 2022

			Tahun 2022 secara online	
			Sertifikasi <i>Professional Trainer</i>	20 - 28 Juli 2022
			Rapat Penyusunan 5 (Lima) Modul Pelatihan Administrasi Umum dan Pengajar Muatan Lokal	1 - 10 Nov 2022
3	Sonia Rosalin Sihite, S.Kom. 19960213 202012 2 011	CPNS/ Pranata Komputer	Pelatihan Dasar CPNS <i>Distance Learning</i> Melalui <i>E-Learning</i> Gelombang I Golongan III angkatan I s.d. XIV Tahun 2022	31 Januari s/d 30 April 2022
			Pelatihan Muatan Lokal Administrasi Umum bagi peserta Latsar CPNS Gol.III secara <i>Online</i> .	28 Maret 2022 s/d 22 April 2022
4	Annisa Ulfa Zulfiati, A. M.d. S.I 19961005 202012 2 004	CPNS/ Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Dasar CPNS <i>Distance Learning</i> Melalui <i>E-Learning</i> Gelombang II Golongan II angkatan I s.d. XIV Tahun 2022	21 Februari s/d 31 Mei 2022
			Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A. 2022	23 s/d 25 Februari 2022
			E- Learning Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X Tahun Anggaran Tahun 2022	19 s/d 27 September 2022
5	Agma Ayunda, A.Md 19930127 201903 2 010	Pengelola Sistem dan Jaringan/ Bendahara	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian T.A. 2022	23 - 25 Feb 2022
			Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	18 Maret 2022
6	Ichwan Syahrial, S.E. 19690706 200502 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	18 Maret 2022
			Pelatihan Online Penyusunan SPIP Integratif Angkatan 3	10 -14 Oktober 2022
7	Rahmi Zolla, S.H. 19961215 202203 2 019	CPNS/Anali s Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II	15 Ags - 12 Nov 2022

			Angkatan I s.d IV Tahun 2022	
8	Cindy Daniela Lamandasa, S.H. 19990207 202203 2003	CPNS/Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d IV Tahun 2022	15 Ags - 12 Nov 2022
9	Muhammad Karyadi, S.E. 19900106 202203 1004	CPNS/Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d IV Tahun 2022	15 Ags - 12 Nov 2022
10	Nurhusni, A.Md.A.B 19980126 202203 2009	CPNS/Pengelola Perkara	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d IV Tahun 2022	15 Ags - 12 Nov 2022
11	Musilatur Rahmat, A.Md. 19930109 202203 1003	CPNS/Pengelola Perkara	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d IV Tahun 2022	15 Ags - 12 Nov 2022
12	Yohana Bestina Sitanggang, A.Md.Ak. 19990903 202203 2005	CPNS/Pengelola Barang Milik Negara	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d IV Tahun 2022	15 Ags - 12 Nov 2022
13	Zulkifli Lubis, S.E. 19780304 200604 1002	Sekretaris	Pelatihan Online Penyusunan SPIP Integratif Angkatan 2	3 - 7 Oktober 2022
			Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja Angkatan 1	10 - 14 Oktober 2022
			Pelatihan ECSCS <i>Threshold Level for Nasional Leadership Training</i> Tahun 2022	17 - 21 Oktober 2022

			Pelatihan Online Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Angkatan 1 s/d 5 dari tempat tugas Tahun 2022	24 - 28 Oktober 2022
			Rapat Penyusunan 5 (Lima) Modul Pelatihan Administrasi Umum dan Pengajar Muatan Lokal	1 - 10 Nov 2022

4) Pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Nama	Diklat	Waktu
1.	Muhammad Hibrian, S.H.	Pelatihan Online Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Angkatan 1 s.d 5 dari tempat tugas	5 hari
2.	Muhammad Hibrian, S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung 2045	8 hari
3.	Shinta Viliasary, S.H	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXIV Tahun 2021	830 jam
4.	Shinta Viliasary, S.H	Pelatihan Champion Meeting – Court Excellence Training pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI Tahun 2022	3 hari
5.	Shinta Viliasary, S.H	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 T.A. 2022 dari tempat tugas	81 Jam
6.	Shinta Viliasary, S.H	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung 2045	8 hari
7.	Suyono, S.H	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXIV Tahun 2021	830 jam
8.	Junia Sari Wartati, S.H	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXIV Tahun 2021	830 jam
9.	Junia Sari Wartati, S.H	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja Angkatan 1 s.d 5 dari tempat tugas	45 Jam
10.	- Junia Sari Wartati, S.H. - Sisca Utama - Dini Maulidya Rahmawati, A.Md.	Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Wilayah Sumatera Barat Tahunan T.A. 2021	4 hari
11.	- Sarman, S.H. - Suhendri - Yasdi, S.H. - Efendi, S.H. - Syafria Nova, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia	3 hari

12.	Dini Maulidya Rahmawati, A.Md.	Pelatihan E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX T.A. 2022 secara daring	7 hari
13.	- Efendi, S.H. - Suyono, S.H - Titin Desriana Ompusunggu, S.Kom - Sisca Utama	Peserta Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	1 hari
14.	Sisca Utama	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran Digipay	1 hari
15.	- Junia Sari Wartati, S.H. - Suyono, S.H - Titin Desriana Ompusunggu, S.Kom	Bimbingan Teknis Keuangan Tahun Anggaran 2022 sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	3 hari
16	Titin Desriana Ompusunggu, S.Kom	Pelatihan E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan VI T.A. 2022 secara daring	6 hari
17.	- Muhammad Hibrian, S.H. - Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H. - Rimson Situmorang, S.H., M.H. - Suhendri Yasdi, S.H. - Sarman, S.H. - Sisca Utama - Mai Ratna Juita, A.Md., A.B	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	2 hari

5) Pengadilan Negeri Payakumbuh

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
N	I	H	I	L

6) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
N	I	H	I	L

7) Pengadilan Negeri Batusangkar

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	NIHIL			

8) Pengadilan Negeri Solok

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Adri, S.H.	Hakim	Pelatihan Champion Meeting - Court Excellence Training Pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI TA 2022	13 s.d. 17 Jan 2022
2.	Lasria Aritonang, S.Kom.	CPNS	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Angkatan II	14 Feb s.d. 30 Apr 2022
3.	Durmawel Fernando, S.E.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Keuangan BMN dan Kepegawaian TA 2022 se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	23 s.d. 25 Feb 2022
4.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	CPNS	Bimbingan Teknis Keuangan BMN dan Kepegawaian TA 2022 se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	23 s.d. 25 Feb 2022
5.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	CPNS	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Angkatan V	9 Mar s.d. 21 Apr 2022
6.	Lasria Aritonang, S.Kom.	CPNS	Pelatihan Muatan Lokal Administrasi Umum bagi Peserta Latsar CPNS Golongan III Secara	28 Mar s.d. 22 Apr 2022

			Online Dari Tempat Tugas Tahun 2022	
7.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	CPNS	Pelatihan Muatan Lokal Administrasi Umum bagi Peserta Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan 1 s.d. 14 Secara Online Dari Tempat Tugas Tahun 2022	11 s.d. 27 Mei 2022
8.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	CPNS	Pelatihan Muatan Lokal Administrasi Umum bagi Peserta Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan 1 s.d. XIV Secara Online Dari Tempat Tugas Tahun 2022	30 Mei s.d. 3 Jun 2022
9.	Nurul Husni Shafira, S.H.	CPNS	Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	5 s.d. 29 Sep 2022 & 7 s.d. 12 Nov 2022
10.	Thariq Al Fayen, S.H.	CPNS	Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	5 s.d. 29 Sep 2022 & 7 s.d. 12 Nov 2022
11.	Ratih Maisrah, A.Md.A.B.	CPNS	Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	12 Sep s.d. 6 Okt 2022 & 14 s.d. 19 Nov 2022
12.	Rahmat Taufiq, A.Md	CPNS	Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I s.d. IV Tahun 2022	12 Sep s.d. 6 Okt 2022 & 14 s.d. 19 Nov 2022

13.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	CPNS	E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX Tahun Anggaran 2022	22 s.d. 30 Agu 2022
14.	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	Pelatihan Online Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Angkatan 1 s.d. 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	10 s.d. 14 Okt 2022
15.	Herly Bastian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja Angkatan 1 s.d. 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	10 s.d. 14 Okt 2022
16.	Adri, S.H.	Hakim	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung 2045	16 s.d. 25 Nov 2022
17.	Firdinansyah Yursal, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Keuangan Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	28 s.d. 30 Nov 2022
18.	Herly Bastian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Bimbingan Teknis Keuangan Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	28 s.d. 30 Nov 2022
19.	Prayudi Arnael, S.Kom.	Fungsional Perencana Pertama/ Bendahara Penerimaan	Bimbingan Teknis Keuangan Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	28 s.d. 30 Nov 2022
20.	Rahmat Kasbin, S.H.	Jurusita Pengganti/ Bendahara Pengeluaran	Bimbingan Teknis Keuangan Tahun Anggaran 2022 Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	28 s.d. 30 Nov 2022

9) Pengadilan Negeri Painan

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	NIHIL			

10) Pengadilan Negeri Padang Panjang

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	NIHIL			

11) Pengadilan Negeri Lubuk Basung

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	NIHIL			

12) Pengadilan Negeri Tanjung Pati

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Isnandar Syahputra, SH.MH	Hakim	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Bagi Fasilitator (TOT)	24 s.d 28 Januari 2022
2	Isnandar Syahputra, SH.MH	Hakim	Pelatihan Champion Meeting-Court Excellence Training	13 s.d 17 Januari 2022
3	Lingga Febriyanti, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Champion Meeting-Court Excellence Training	13 s.d 17 Januari 2022
4	Supituarman, S.E	Sekretaris	Sosialisasi Penerapan RB melalui Pembangunan ZI WBK	16 s.d 18 September 2022

13) Pengadilan Negeri Koto Baru

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Candra Widiyanto, S.Kom	Pranata Komputer	Latsar	31-Januari-2022 s/d 30-April-2022
2	Aprilia Kusdariyanti, A.Md	Arsiparis	Latsar	21-Februari-2022 s/d 31-Mei-2022
3	Febri Charlin, S.E	Kasubbag UM&KU	Bimtek Ku Bmn& Kep	23-Februari-2022 s/d 25-Februari-2022

4	Ratna Nila Sari,S.H	Kasubbag Kepegawaian	Bimtek Ku Bmn& Kep	23-Februari-2022 s/d 25-Februari-2022
5	Alharis Muslim	Staf	Bimtek Ku Bmn& Kep	23-Februari-2022 s/d 25-Februari-2022
6	Guspardian	Kasubbag PTIP	Bimtek Ku Bmn& Kep	23-Februari-2022 s/d 25-Februari-2022
7	Alharis Muslim	Staf	Diklat Teknis Pengelola Arsip Dinamis	5-Mei-2022 s/d 8-Mei-2022
Total Diklat Non Teknis				7 orang

14) Pengadilan Negeri Muaro

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1.	Boy Wira Ardiles, SH	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I sd. IV Tahun 2022	15 Agustus s.d 19 November 2022
2.	Imelia Fidra, Amd.A.B	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Padang Gelombang I dan II Angkatan I sd. IV Tahun 2022	15 Agustus s.d 19 November 2022
Jumlah		2 Orang		

15) Pengadilan Negeri Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Ani Marie, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Diklat Pelathan Anggaran dan Perbendaharaan	28 Maret 2022 s/d 8 April 2022
			Bimtek Keuangan, BMN dan Kepegawaian TA.2022 se-Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Padang	23 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
			Bimtek Keuangan dan SAKIP	28 November 2022 s/d 30 November 2022

			Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	20 Oktober 2022
2	Ade Candra, SH	Sekretaris	Bimtek Keuangan, BMN dan Kepegawaian TA.2022 se-Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Padang	23 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
			Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer bagi pengajar muatan Lokal Tahun 2022	20 Juli 2022 s/d 28 Juli 2022
3	Dian Sari, A.Md.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Bimtek Keuangan, BMN dan Kepegawaian TA.2022 se-Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Padang	23 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
4	Neli Astri, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Bimtek Keuangan, BMN dan Kepegawaian TA.2022 se-Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Padang	23 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
			Bimtek Keuangan dan SAKIP	28 November 2022 s/d 30 November 2022
			Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	20 Oktober 2022
5	Warman Priatno, SH., MH.	Panitera Muda Pidana	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	20 Oktober 2022
6	Rully Mardianto, SH	Jurusita	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	20 Oktober 2022
7	Kuntari Dewi, SE., MM.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pealporan	Diklat Online Penyusunan LAKIP Angkatan II Tahun 2022	17 Oktober 2022 s/d 21 Oktober 2022
8	Dini Hayati, S.Kom	Pranata Komputer	Latsar CPNS	31 Januari 2022 s/d 30 april 2022
9	Elsa Magdalena Sinurat, A.Md, AB	Ariparis	Latsar CPNS	21 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022
10	Riyan Hidayat, SH.	CPNS	Latsar CPNS	15 Agustus 2022 s/d 4 November 2022

11	Nugaraha Hadi Yulianto, SH	CPNS	Latsar CPNS	15 Agustus 2022 s/d 4 November 2022
12	Ahmad Nuril Ihsan, SH.	CPNS	Latsar CPNS	15 Agustus 2022 s/d 4 November 2022
13	Putri Dwi Afrisia, A.Md	CPNS	Latsar CPNS	15 Agustus 2022 s/d 11 November 2022
14	Merisa Herry, A.Md. AB	CPNS	Latsar CPNS	15 Agustus 2022 s/d 11 November 2022

16)Pengadilan Pulau Punjung

NO	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	Kardinal, S.T., S.H.	Kasubag PTIP	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan	23 s.d 25 Februari 2022
2	Alexsander Leo Mandala Putra, S.H.	Kasubag KorTaLa	Bimbingan Teknis Keuangan, BMN dan Kepegawaian	23 s.d 25 Februari 2022
			Diklat Manajemen SDM	14 Juni s.d 5 Agustus 2022
3	Silvia Dewi, S.E.	Analisis Tata Laksana	Bimbingan Teknis Digital Payment	26 Agustus 2022
4	Junius Waruwu, S.H.	CPNS/ Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Latihan Dasar (Latsar) CPNS	6 s.d 12 November 2022
5	Tony Zulfian, A.Md.A.B	CPNS/ Pengelola Perkara	Pelatihan Latihan Dasar (Latsar) CPNS	13 s.d 19 November 2022

BAB IV
**PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFROMASI**

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga) program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01 BUA)
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01 BUA)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03 BADILUM)

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2022

Satuan Kerja	Pagu 2022	Realisasi	Sisa	Capaian
Pengadilan Tinggi Padang	21,087,402,000	20,363,754,125	723,647,875	97%
Pengadilan Negeri Padang	15,866,745,000	15,537,047,631	329,697,369	98%
Pengadilan Negeri Pariaman	5,470,082,000	5,460,781,993	9,300,007	99%
Pengadilan Negeri Bukittinggi	6,102,152,000	6,071,594,827	30,557,173	99%
Pengadilan Negeri Sawahlunto	3,585,634,000	3,478,054,698	107,579,302	97%
Pengadilan Negeri Payakumbuh	5,016,374,000	4,518,733,664	497,640,336	90%
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	4,393,788,000	4,230,915,617	162,872,383	96%
Pengadilan Negeri Batusangkar	4,512,277,000	4,487,731,226	24,545,774	99%
Pengadilan Negeri Solok	4,249,065,000	4,043,726,352	205,338,648	95%
Pengadilan Negeri Painan	3,731,975,000	3,698,978,918	32,996,082	99%
Pengadilan Negeri Padang Panjang	4,087,215,000	4,003,390,445	83,824,555	98%
Pengadilan Negeri Lubuk Basung	4,630,729,000	4,595,332,797	35,396,203	99%
Pengadilan Negeri Tanjung Pati	3,887,152,000	3,876,519,907	10,632,093	99%
Pengadilan Negeri Koto Baru	4,583,676,000	4,518,385,812	65,290,188	99%
Pengadilan Negeri Muaro	3,733,415,000	3,600,101,154	133,313,846	96%
Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4,060,679,000	4,057,428,725	3,250,275	99%
Pengadilan Negeri Pulau Punjung	8,844,911,000	8,453,701,977	391,209,023	96%
Total	107,843,271,000	104,996,179,868	2,847,091,132	97%

Tabel 2. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2022

Satker	Pagu 2022	Realisasi	Sisa	Capaian
Pengadilan Tinggi Padang	440,320,000	436,972,814	3,347,186	99%
Pengadilan Negeri Padang	453,115,000	449,943,557	3,171,443	99%
Pengadilan Negeri Pariaman	215,520,000	213,780,000	1,740,000	99%
Pengadilan Negeri Bukittinggi	103,240,000	103,204,000	36,000	99%
Pengadilan Negeri Sawahlunto	56,530,000	56,266,790	263,210	99%
Pengadilan Negeri Payakumbuh	88,200,000	86,860,580	1,339,420	98%
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	57,050,000	56,521,950	528,050	99%
Pengadilan Negeri Batusangkar	88,840,000	84,807,800	4,032,200	95%
Pengadilan Negeri Solok	50,025,000	44,160,000	5,865,000	88%
Pengadilan Negeri Painan	106,427,000	102,167,250	4,259,750	96%
Pengadilan Negeri Padang Panjang	46,116,000	44,529,850	1,586,150	97%
Pengadilan Negeri Lubuk Basung	111,150,000	109,604,320	1,545,680	99%
Pengadilan Negeri Tanjung Pati	140,320,000	140,213,200	106,800	99%
Pengadilan Negeri Koto Baru	144,450,000	140,467,000	3,983,000	97%
Pengadilan Negeri Muaro	63,407,000	62,939,000	468,000	99%
Pengadilan Negeri Pasaman Barat	306,418,000	304,305,550	2,112,450	99%
Pengadilan Negeri Pulau Punjung	70,743,000	68,867,050	1,875,950	97%
Total	2,541,871,000	2,505,610,711	36,260,289	99%

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1) Sarana/Prasarana Gedung Kantor

***Tabel Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
Wilayah Pengadilan Tinggi Padang dan
Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat***

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	*KETERANGAN
I.	PENGADILAN TINGGI PADANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	7	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang umum	-	
8	Ruang Sidang Anak	-	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	2	
12	Ruang Kepaniteraan PHI	-	
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	2	
15	Ruang Jurusita	-	
16	Ruang Kepegawaian dan Perencanaan	2	
17	Ruang Umum dan Keuangan	2	
18	Ruang Server	1	
19	Ruang Panmud Pidana	-	
20	Ruang Panmud Perdata	-	
21	Ruang Panmud Hukum	-	

22	Ruang Panmud PHI	-	
23	Ruang Panmud Tipikor	-	
24	Ruang Kasub Umum	-	
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	-	
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	
27	Ruang Bendahara	-	
28	Ruang Mediasi	-	
29	Ruang Kaukus	-	
30	Ruang Perpustakaan	1	
31	Ruang Arsip	2	
32	Ruang Jaksa	-	
33	Ruang Polisi	-	
34	Ruang Posbakum	-	
35	Ruang Advokat/Pengacara	-	
36	Ruang Tahanan	-	
37	Ruang Penjaga Tahanan	-	
38	Ruang Barang Bukti	-	
39	Ruang Laktasi	-	
40	Ruang Teleconference	1	
41	Ruang Control Audio	-	
42	Ruang ATK	1	
43	Ruang M.E	-	
44	Toilet	10	
45	Toilet Difable	1	
46	Mushola	1	
47	Tempat Wudhuk	1	
48	Ruang Penyimpanan	1	
49	Aula	-	

50	Ruang Tunggu PTSP	1	
51	Ruang Tunggu Terbuka	1	
52	Ruang Tunggu Anak	-	
53	Ruang PTSP	1	
54	Ruang Kasir	-	
55	Ruang Rapat	1	
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	
57	Ruang Makan Hakim	-	
58	Ruang Istirahat Ketua	-	
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	-	
60	Ruang Istirahat Security	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Fotocopy Electronic	1	
2	Lemari Besi/Metal	16	
3	Lemari Kayu	37	
4	Rak Besi	3	
5	Filing Kabinet Besi	-	
6	Brandkas	1	
7	Mobile File	11	
8	Tabung Pemadam Api	10	
9	CCTV-Camera Control Television System	1	
10	Papan Visual/Papan Nama	3	
11	Mesin Absensi	2	
12	Overhead Projector	1	
13	Display	1	
14	Pintu Elektrik	-	
15	Meja Kerja Kayu	78	
16	Kursi Besi/Metal	224	

17	Kursi Kayu	1	
18	Sice	15	
19	Meja Rapat	13	
20	Tempat Tidur Kayu	7	
21	Meja Resepsionis	-	
22	Meja Makan Kayu	9	
23	Publik Astari (Pembatas Antrian)	-	
24	Nakas	7	
25	Meubelair Lainnya	-	
26	Jam Elektronik	-	
27	Mesin Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	-	
28	Mesin Pemotong Rumput	-	
29	Mesin 'Cuci	8	
30	Lemari Es	10	
31	A.C. Split	53	
32	Kipas Angin	4	
33	Alat Pendingin Lainnya	2	
34	Kitchen Set	2	
35	Televisi	11	
36	Loudspeaker	3	
37	Sound System	2	
38	Microphone Table Stand	21	
39	Unit Power Supply	5	
40	Stabilisator	-	
41	Camera Video	1	
42	Dispenser	15	
43	Lambang Instansi	1	
44	Vertical Blind	1	
45	Gordyin/Kray	7	

46	Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)	2	
47	Compact Disc Player	-	
48	Camera Digital	1	
49	Telephone (PABX)	21	
50	Facsimile	-	
51	Genset	1	
52	Local Area Network (LAN)	1	
53	Internet	3	
54	P.C. Unit	68	
55	Laptop	35	
56	Printer	23	
57	Scanner	4	
58	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	
59	Jaringan dengan Media Udara Lainnya	1	
II.	PENGADILAN NEGERI PADANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang umum	6	
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Kepaniteraan PHI	1	

13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	2	
15	Ruang Jurusita	1	
16	Ruang Kepegawaian, Ortala gabung dengan Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
17	Ruang Umum dan Keuangan	1	
18	Ruang Server	1	
19	Ruang Panmud Pidana	1	
20	Ruang Panmud Perdata	1	
21	Ruang Panmud Hukum	1	
22	Ruang Panmud PHI	1	
23	Ruang Panmud Tipikor	1	
24	Ruang Kasub Umum	1	
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1	
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
27	Ruang Bendahara	1	
28	Ruang Mediasi	1	
29	Ruang Kaukus	1	
30	Ruang Perpusakaan	1	
31	Ruang Arsip	3	
32	Ruang Jaksa	1	
33	Ruang Polisi	1	
34	Ruang Posbakum	1	
35	Ruang Advokat/ Pengacara	1	
36	Ruang Tahanan	5	
37	Ruang Penjaga Tahanan	2	
38	Ruang Barang Bukti	1	
39	Ruang Laktasi	1	
40	Ruang Teleconference	1	

41	Ruang Control Audio	1	
42	Ruang ATK	1	
43	Ruang M.E	2	
44	Toilet	28	
45	Toilet Difable	2	
46	Mushola	1	
47	Tempat Wudhuk	1	
48	Ruang Penyimpanan	4	
49	Aula	1	
50	Ruang Tunggu PTSP	1	
51	Ruang Tunggu Terbuka	2	
52	Ruang Tunggu Anak	1	
53	Ruang PTSP	1	
54	Ruang Kasir	1	
55	Ruang Rapat	2	
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	
57	Ruang Makan Hakim	1	
58	Ruang Istirahat Ketua	1	
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1	
60	Ruang Istirahat Security	1	
	Sarana dan Pra Sarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13Inci)	2	Buah
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inci)	5	Buah
3	Mesin Fotocopy Electronic	2	Buah
4	Lemari Besi	15	Buah
5	Lemari Kayu	165	Buah

6	Rak kayu	40	Buah
7	Filling Cabinet Besi	19	Buah
8	Filling Cabinet kayu	4	Buah
9	Brankas	5	Buah
10	Mobile File	5	Buah
11	CCTV	2	Buah
12	Papan Visual/Papan Nama	9	Buah
13	White Board	20	Buah
14	Mesin Absensi	3	Buah
15	LCD Projector/Infocus	1	Buah
16	Perkakas Kantor Lainnya	8	Buah
17	Meja Kerja Kayu	181	Buah
18	Kursi Besi/Metal	557	Buah
19	Kursi Kayu	114	Buah
20	Sice	28	Buah
21	Bangku Panjang Besi/Metal	8	Buah
22	Bangku Panjang Kayu	71	Buah
23	Meja Rapat	50	Buah
24	Meja Komputer	13	Buah
25	Meja Telepon	1	Buah
26	Meja Resepsionis	2	Buah
27	Kasur/Spring Bed	3	Buah
28	Kursi Fiber Glas / Plastik	10	Buah
29	Partisi	2	Buah
30	Nakas	3	Buah
31	Jam Elektronik	17	Buah
32	AC Window	2	Buah
33	AC Split	38	Buah

34	Kipas Angin	27	Buah
35	Televisi	8	Buah
36	Tape Recorder (Alat Rumah tangga lainnya)	1	Buah
37	Sound System	3	Buah
38	Wireless	1	Buah
39	Mic Conference	1	Buah
40	Lambang Garuda Pancasila	4	Buah
41	Gambar Presiden / Wakil Presiden	2	Buah
42	Tiang Bendera	17	Buah
43	Kaca Hias	5	Buah
44	Mimbar/Podium	2	Buah
45	Palu Sidang	4	Buah
46	Lambang Instansi	1	Buah
47	Kabel Roll	1	Buah
48	Audio Visual	1	Buah
49	UPS	15	Buah
50	Pesawat telepon	22	Buah
51	Facsimilie	3	Buah
52	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	4	
53	Switcher Combination	7	Buah
54	Loudspeaker	11	Buah
55	PC Unit	131	Buah
56	Laptop	44	Buah
57	Monitor	4	Buah
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	69	Buah
59	Scanner(Peralatan Personal Komputer)	9	Buah
60	Server	4	Buah

61	Router	2	Buah
62	Hub	2	Buah
63	Kabel UTP	3	Buah
64	Audio Mixing Console	3	Unit
65	Webcam	1	Unit
66	HT (Handy Talkie)	10	Unit
67	Meja Kerja Kubikal 2	2	Unit
68	Meja Kerja Kubikal 4	16	Unit
69	Meja Kerja Bendaharadan Meja Kerja Hakim	26	Unit
70	Meja Kerja Sekretaris dan Meja Kerja Panitera	2	Set
71	Meja Kerja Panmud dan Meja Kerja Kasubag	8	Unit
72	Sofa RuangKerja	2	Unit
73	Kursi Staff dan Kursi Kerja Bendahara	69	Unit
74	Kursi Staff PTSP	7	Unit
75	Kursi Kerja Panmud, Kursi Kerja Kasubag, Kursi Kerja Hakim	33	Unit
76	Kursi Sekretaris, Kursi Panitera, Kursi Pimpinan Rapat	6	Unit
77	Kursi Rapat	16	Unit
78	Kursi Hadap Sekretaris dan Kursi Hadap Panitera	4	Unit
79	Kursi Hadap Panmud, Kursi Hadap Kasubag, Kursi Hadap Bendahara, Kursi Hadap PTSP	24	Unit
80	Kursi Kerja Ketua, Kursi Kerja Wakil Ketua	2	Unit
81	Kursi Rapat Ketua, Kursi Rapat Wakil Ketua	14	Unit
82	Kursi Hadap Ketua, Kursi Hadap Wakil Ketua	4	Unit
83	Kursi Terdakwa	6	Unit
84	Meja Kerja Ketua, Meja Kerja Wakil Ketua	4	Unit
85	Meja Sidang Utama	1	Unit
86	Meja Sidang Jaksa Penuntut dan Meja Penasehat Hukum	2	Unit

87	Meja Panitera	1	Unit
88	Kursi Sidang Hakim Ketua	1	Unit
89	Kursi Sidang Hakim Anggota	4	
90	Kursi Sidang Jaksa Penuntut, Kursi Penasehat Hukum, dan Kursi Panitera Pengganti	9	
91	Microphone	7	
92	Wireless Mic	2	
93	Camera Digital	1	
94	Wireless IP Camera	2	
95	Walker Polding	4	
96	Tongkat Pedel	16	
97	Kursi Roda	2	
98	Aid Hearing	2	
99	Headset	1	
III.	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Mediasi	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Kepaniteraan	1	
13	Ruang Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	

14	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
15	Ruang Umum dan Keuangan	1	
16	Ruang Server	1	
17	Ruang Posbakum	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Arsip	1	
20	Ruang Jaksa	1	
21	Ruang Polisi	1	
22	Ruang Pengacara	1	
23	Ruang Tahanan	2	
24	Ruang Barang Bukti	-	
25	Ruang Laktasi	1	
26	Toilet Ketua	1	
27	Toilet Wakil Ketua	1	
28	Toilet Hakim	2	
29	Toilet Panitera	1	
30	Toilet Sekretaris	1	
31	Toilet Pegawai	2	
32	Toilet Umum	2	
33	Toilet Tahanan	4	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Videoscope With Side Band Adaptor	1	
2	Scanner (Universal Tester)	2	
3	Neraca Percisi (Elektronik Vacuum Me)	1	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	
6	Lemari Kayu	35	
7	Filling Cabinet Besi	8	

8	Barndkas	3	
9	Tabung Pemadam Api	7	
10	CCTV	10	
11	Papan Nama/Papan Visual	23	
12	White Board	9	
13	Mesin Absensi	2	
14	Perkakas Kantor Lainnya	35	
15	Meja Kerja Kayu	99	
16	Kursi Besi/Metal	309	
17	Kursi Kayu	33	
18	Sice	9	
19	Bangku Panjang Besi/Metal	4	
20	Bangku Panjang Kayu	43	
21	Meja Komputer	5	
22	Meja Resepsionis	2	
23	Partisi	2	
24	Jam Elektronik	8	
25	Mesin Pemotong Rumput	1	
26	AC Window	8	
27	AC Split	17	
28	Kipas Angin	5	
29	Televisi	4	
30	Amplifier	1	
31	Loudspeaker	1	
32	Sound System	4	
33	Megaphone	1	
34	Microphone	1	
35	Microphone Table Stand	1	
36	Mic Conference	5	

37	Lambang Garuda Pancasila	4	
38	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
39	Tiang Bendera	6	
40	Kaca Hias	4	
41	Palu Sidang	4	
42	Lambang Instansi	2	
43	Vertical Blind	225	
44	Intercom Unit	3	
45	Uninterruptible Power Suply (UPS)	6	
46	LCD Monitor	1	
47	Pesawat Telephone	1	
48	Facsimile	1	
49	Genset	1	
50	Internet	1	
51	Komputer Jaringan Lainnya	1	
52	P.C. Unit	30	
53	Lap Top	16	
54	Note Book	2	
55	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	
58	Server	1	
59	Router	1	
60	Alat Tennis Meja	1	
61	Monografi	13	
62	Kios K	1	
IV.	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI		

1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Kesekretariatan	3	
	Sarana/ Pra Sarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	50	
2	Laptop	18	
3	Server	3	
4	Infokus	1	
5	PABX	1	
6	Mesin Fotocopy	1	
7	AC Split	5	
8	AC Window	5	
9	Printer	35	
10	Scanner	4	
11	Facsimile	1	
12	Genset	1	
13	UPS	12	
V.	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	

5	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Sidang Umum	3	
8	Ruang Kepaniteraan	3	
9	Ruang Kesekretariatan	3	
10	Ruang Rapat	1	
11	Ruang Mediasi	1	
12	Ruang Laktasi	1	
13	Ruang Posyankum	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Ramah Anak	1	
16	Ruang Barang Bukti	1	
17	Ruang Serbaguna	1	
18	Ruang Tahanan	2	
19	Mushalla dan Ruang Ginset	1	
20	Dapur Bersih	1	
21	Toilet Umum	4	
22	Gudang	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inc)	24	Baik 4 Rusak berat 20
2	Mesin Hitung Manual	2	Rusak Berat
3	Mesin Hitung Elektrik/kalkulator	1	Rusak Berat
4	Mesin Stensil Manual folio	1	Rusak Berat
5	Mesin Fotocopy electronic	1	Rusak Berat
6	Lemari Besi	3	Baik
7	Lemari Kayu	81	68 Baik, 13 Rusak Berat,

8	Rak Besi	4	Baik
9	Filing Cabinet Besi	11	Baik
10	Brankas	4	Baik
11	Tabung Pemadam Api	16	15 Baik 1 Rusak Berat
12	Camera Control Television System	1	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
14	Mesin Absensi	1	Baik
15	Papan Nama	12	Baik
16	Hand Metal Detektor	1	Baik
17	Lcd Projector	1	Baik
18	Focusing Screen	1	Baik
19	Papan Gambar	24	24 Baik
20	Perkakas kantor lainnya	8	8 Baik
21	Meja kerja kayu	87	Baik
22	Kursi Metal	136	Baik
23	Kursii kayu	22	Baik
24	Sice	18	12 Baik, 6 Rusak Berat
25	Bangku Panjang kayu	42	Baik
26	Meja Rapat	1	Baik
27	Meja Komputer	5	Baik
28	Meja Ketik	1	Rusak Berat
29	Meja Resepcionist	2	Baik
30	Kursi Fiberglas	53	Baik 52 dan Rusak Ringan 1

31	Partisi	1	Baik
32	Publik Astari	2	Baik
33	Jam Listrik	1	Rusak Berat 1
34	Jam elektronik	16	Baik 14, Rusak Berat 2
35	Mesin Penghisap Debu	2	Baik
36	Mesin Pemotong rumput	1	Baik
37	AC Split	32	Baik
38	Portable Air Conditioner	1	Baik
39	Kipas Angin	15	Baik 11 dan Rusak Berat 4
40	Alat Pendingin Lainnya	4	Baik
41	Tape Recorder	3	Baik 1 dan Rusak Berat 3
42	Laoudspeaker	4	Baik 3 dan Rusak Berat 1
43	Sound system	4	Baik 3, Rusak Berat 1
44	Microphone	2	Rusak Berat
45	Microphone Table stand	7	Baik 5, Rusak Berat 2
46	Tustel	2	Rusak Berat
47	Lambang Garuda Pancasila	5	Baik
48	Gambar President/ wakil	3	Baik
49	Tangga Aluminium	1	Baik
50	Kaca Hias	1	Baik
51	Palu Sidang	2	Baik
52	Lambang Instansi	1	Baik
53	Karpet	2	Baik

54	Gordyn	2	Baik
55	Audio Mixing Console	2	Baik
56	Audio Mixing Portable	1	Baik
57	Intercom Unit	8	Rusak Berat
58	Wireless Mic	3	Baik
59	Boom Stand	1	Baik
60	UPS	13	Baik
61	Lcd Monitor	3	Baik
62	PABX	1	Baik
63	Pesawat Telepon	2	Baik
64	Faximile	1	Baik
65	Genset	2	Baik
66	Internet	1	Baik
67	PC Unit	30	Baik
68	Laptop	16	Baik
69	Note Book	2	Baik
70	Printer	22	Baik 14 Rusak Berat 8
71	Scaner	2	Baik
72	Viewer	1	Baik
73	Server	3	Baik
74	Router	2	Baik
75	Rak Server	1	Baik
76	Switch	1	Baik

77	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
78	Monitor	2	Baik
79	Printer (peralatan personal computer)	42	Baik 23 dan Rusak Berat 19
80	Peralatan rumah tangga lainnya	39	Baik
81	Server	2	Baik
82	Router	1	Baik
83	Switch	4	Baik
84	Monografi	6821	Baik
VI.	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI		
1	Ruang Ketua	1	B
2	Ruang Wakil Ketua	1	B
3	Ruang Hakim	2	B
4	Ruang Panitera	1	B
5	Ruang Sekretaris	1	B
6	Ruang Sidang	3	B
7	Ruang Panmud Pidana	1	B
8	Ruang Panmud Perdata	1	B
9	Ruang Panmud Hukum	1	B
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	B
11	Ruang Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	1	B
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	B
13	Ruang Klinik Kesehatan	1	B
14	Ruang Pos Pelayanan Hukum	1	B
15	Ruang Gasrased/ Dapur	1	B
16	Ruang Arsip	1	B
17	Ruang Perpustakaan	1	B

18	Ruang Tunggu Anak	1	B
19	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1	B
20	Ruang Jaksa	1	B
21	Ruang Penasehat Hukum	1	B
22	Ruang Bapas	1	B
23	Ruang Tahanan	1	B
24	Ruang Tahanan Anak	2	B
25	Ruang Mediasi / Diversi	1	B
26	Ruang Media center	1	B
27	Ruang Ziiting platz	2	Suliki dan Pangkalan
28	Ruang Toilet	18	B=13, RB=4
29	Ruang Mushola	1	B
30	Ruang Genset	1	B
31	Ruang Penyimpanan	1	B
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inc)	5	B=5
2	Lemari kayu	42	B=29, RR=13
3	Rak kayu	4	B
4	Filing Cabinet besi	7	B=5, RR=2
5	Brankas	2	B=1, RR=1
6	Peti uang /cashbox/Coin Box	3	B=1, RR=2
7	Kardek Besi	2	B=1, RR=1
8	Buffet	1	B=1
9	Locker	3	B=3
10	Tabung pemadam api	4	RB
11	CCTV	4	B=4
12	Papan visual/ papan nama	2	B=2

13	White board	14	B=8, RR=6
14	Mesin absen	2	B=2
15	Hand Metal detector	1	B=1
16	Perkakas Kantor Lainnya	2	B=1, RB=1
17	Meja kayu	92	B=57, RR=35
18	Kursi besi/metal	201	B=180, RR=21
19	Kursi kayu	187	B=140, RR=47
20	Sice	22	B=21, RR=1
21	Bangku Panjang besi/metal	12	B=12
22	Bangku panjang kayu	17	B=3, RR=14
23	Meja rapat	10	B=8, RR=2
24	Meja komputer	11	B=11
25	Meja telepon	1	B=1
26	Meja Resepsionis	2	B=2
27	Partisi	3	B=3
28	Meubelair lainnya	1	B=1
29	Jam elektronik	17	B=13, RR=4
30	Mesin penghisap debu	2	B=2
31	Mesin potong rumput	1	B=1
32	Lemari es	2	B=2
33	Ac Split	19	B=19
34	Kipas angin	11	B=11
35	Kompor gas	1	B=1
36	Rice cooker	1	B=1
37	Oven listrik	1	Baik
38	Televisi	3	B=3
39	Loudspeaker	5	B=5
40	Sound System	3	B=3

41	Microphone	7	B=7
42	Lambang Garuda Pancasila	3	RR=3
43	Tiang bendera	13	B=5, RR=8
44	Pataka	5	B=5
45	Kaca hias	9	B=6, RR=2, RB=1
46	Palu sidang	2	B=2, RR=4
47	Lambang instansi	1	B=1
48	Vertikal Blind	1	B=1
49	Bracket Standing Peralatan	1	B=1
50	Alat Rumah Tangga lainnya	33	B=33
51	Mixing Console	1	B=1
52	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	B=5
53	Camera Digital	1	B
54	LCD Monitor	1	B=1
55	Camera Conference	3	B=1
56	Telepone (PABX)	1	B
57	Pesawat Telephone	15	B=15
58	Receiver STL/UHF	4	B
59	Lokal Area Network (LAN)	1	B=1
60	P.C unit	35	B=35
61	Lap top	19	B=19
62	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	B=2
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	B=27
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	B=3
65	Server	2	B=2
66	Router	1	B=1
67	Rak Server	1	B=1
68	Switch	4	B=4

69	Monografi	1.913	B=1.864, RR=49
70	Buku lainnya	6	B=6
71	Software komputer	1	B=1
VII.	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH		
1	Ruang Ketua	1	Ada
2	Ruang Wakil Ketua	1	Ada
3	Ruang Hakim	3	Ada
4	Ruang Panitera	1	Ada
5	Ruang Sekretaris	1	Ada
6	Ruang Sidang Umum	3	ada
7	Ruang Kepaniteraan	3	Ada
8	Ruang Kesekretariatan	3	Ada
9	Ruang Mediasi/Diversi/Media Center	1	Ada
10	Ruang Jurusita	-	Tidak Ada
11	Ruang Posbakum	1	Ada
12	Ruang Jaksa dan Bapas	1	Ada
13	Ruang Tahanan	2	Ada
14	Perpustakaan	1	Ada
15	Ruang Arsip	1	Ada
16	Gudang	2	Ada
17	Ruang tunggu anak	1	ada
18	Klinik dan Laktasi	1	Ada
19	Toilet Hakim dan Pegawai	5	Ada
20	Toilet Umum	2	Ada
21	Toilet Tahanan	3	Ada
22	Mushalla (Tempat Ibadah)	1	Ada
23	Kantin	1	ada
24	Smoking Area Umum dan Pegawai	2	ada
25	PTSP	1	Ada

26	Ruang Tamu Terbuka	1	ada
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Lemari Kayu	20	Kondisi baik
2	Rak Besi	8	Kondisi baik
3	Transportabel Generating Set	1	Kondisi Baik
4	Mesin Fotocopy Folio	1	Kondisi baik (Sewa)
5	Filling Kabinet Kayu	3	Kondisi baik
6	Brandkas	2	kondisi baik
7	CCTV	1	Kondisi baik terdiri dari 8 unit kamera
8	Mesin Absensi	2	Kondisi baik
9	Hand Metal Detektor	3	Kondisi baik
10	LCD Projector/Infokus	1	Kondisi baik
11	Focusing Screen/Layar LCD Projektor	1	Kondisi baik
12	Perkakas Kantor Lainnya	5	Kondisi baik
13	Meja Kerja Kayu	53	49 Kondisi Baik dan 4 kondisi rusak ringan
14	Kursi Besi Metal	110	Kondisi baik
15	Kursi Kayu	20	Kondisi baik
16	Sice	6	5 Kondisi baik 1 kondisi Rusak Ringan
17	Bangku Panjang Kayu	24	Kondisi baik
18	Meja Komputer	6	Kondisi baik
19	Meja Reseptionis	3	Kondisi baik
20	Jam elektronik	2	Kondisi baik
21	Lemari Es	1	Kondisi baik
22	Mesin Pemotong Rumput	1	Kondisi baik
23	A.C Split	19	Kondisi baik
24	Kipas Angin	3	Kondisi baik
25	Televisi	4	Kondisi baik
26	Amplifiere	1	Kondisi baik

27	Lodspeaker	7	Kondisi baik
28	Sound System	3	Kondisi baik
29	Microphone Table Stand	5	Kondisi baik
30	Alat hiasan	1	Kondisi Baik
31	Lambang Garuda Pancasila	5	Kondisi baik
32	Gambar Presiden /Wakil Pres	2	Kondisi baik
33	Tiang Bendera	5	Kondisi baik
34	Kaca Hias	1	Kondisi baik
35	Palu sidang	2	Kondisi baik
36	Lambang Instansi	1	Kondisi baik
37	Vertikal Blint	1	Kondisi baik
38	Audio Visual	1	Kondisi baik
39	Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi Baik
40	Audio Mixing Console	1	Kondisi Baik
41	UPS	5	Kondisi baik
42	Digital LED Running Text	1	Kondisi baik
43	LCD Monitor	4	Kondisi baik
44	Kamera Conference	5	Kondisi Baik
45	Telephone (PABX)	1	Kondisi baik
46	Pesawat Telephone	13	Kondisi baik
47	Facsimile	1	Kondisi baik
48	Internet	1	Kondisi baik
49	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi baik
50	PC Unit	39	Kondisi baik
51	Laptop	23	Kondisi baik
52	Printer	14	Kondisi baik
53	Scanner	4	Kondisi baik
54	Server	2	Kondisi baik
55	Router	1	Kondisi baik

56	Hub	1	Kondisi baik
57	Rak Server	1	Kondisi baik
58	Acces Point	9	Kondisi baik
59	Jaringan Transmisi Lainnya	1	Kondisi baik
60	Monografi	8404	Kondisi Baik
VIII.	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	3	Baik
7	Ruang Panmud Pidana	1	Baik
8	Ruang Panmud Perdata	1	Baik
9	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
11	Ruang Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	1	Baik
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
13	Ruang Jaksa	1	Baik
14	Ruang Pos Bantuan Hukum	1	Baik
15	Ruang Ibu dan anak (laktasi)	1	Baik
16	Ruang Arsip	1	Baik
17	Ruang Perpustakaan	1	Baik
18	Ruang Tunggu Anak	1	Baik
19	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1	Baik
20	Ruang Jaksa	1	Baik
21	Ruang Tahanan	2	Baik
22	Ruang Mediasi / Diversi	1	Baik

23	Ruang Ziiting platz	1	Lokasi di Maninjau kondisi baik
24	Ruang Toilet	7	Baik
25	Ruang Mushola	1	Baik
26	Ruang Genset	1	Baik
27	Ruang Penyimpanan	1	Baik
28	Ruang Command Center	1	Baik
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer/PC	22	Baik
2	Laptop	21	Baik
3	Mesin Fotocopy	1	Rusak Ringan
4	Mesin Fotocopy (sewa)	1	Baik
5	AC	15	Baik
6	Faximile	1	Baik
7	Genset	1	Baik
8	Komputer lainnya	3	Baik
9	Printer	15	Baik
10	Scanner	2	Baik
11	Meja Rapat	1	Baik
12	Meja Komputer	4	Baik
13	PABX	1	Rusak
14	Server	2	Baik
15	Router	1	Baik
16	Meja Receptionis	1	Baik
17	Filing Cabinet	12	Baik
18	Lemari Besi Metal	6	Baik
19	Televisi	4	Baik
20	Sound System	1	Baik
21	Mesin Pemetong Rumput	2	Baik
22	Wireless	1	Baik

23	Stabilizer	1	Baik
24	Gordyn	4	Baik
25	UPS	5	Rusak Ringan
26	UPS	4	Baik
27	Lemari Kayu	23	Baik
28	Rak Besi	5	Baik
29	Rak Kayu	4	Baik
30	Filing Cabinet	2	Baik
31	Brankas	1	Baik
32	Kipas Angin	11	Baik
33	CCTV	1	Baik
34	Papan Nama	1	Baik
35	Mesin Absensi	1	Baik
36	Hand Metal Detector	1	Baik
37	Meja Kerja Kayu	36	Baik
38	Lemari Kayu	18	Baik
39	Roll Opek	3	Baik
40	Size	3	Baik
41	Kursi Besi Metal	107	Baik
42	Kursi Kayu	38	Baik
43	Bangku Panjang Kayu	9	Baik
44	Infocus	1	Baik
45	KIOSK	1	BAIK
IX.	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	

4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Humas	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Arsip	1	
13	Ruang Tamu Terbuka	1	
14	Ruang Command Center	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Sel Tahanan	2	
17	Ruang Tunggu Anak	2	
18	Ruang Klinik	1	
19	Ruang Jaksa	1	
20	Ruang Pengacara/Posyankum	1	
21	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	
22	Ruang Laktasi/Menyusui	1	
23	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
24	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
25	Ruang Umum dan Keuangan	1	
26	Ruang Persediaan	1	

27	Ruang Server	1	
28	Ruang Perpustakaan	1	
29	Toilet Ketua	1	
30	Toilet Ketua	1	
31	Toilet Hakim	2	
32	Toilet Difabel	1	
33	Toilet Pegawai	2	
34	Toilet Pengunjung	2	
35	Musholla	1	
36	Toilet Musholla	2	
37	Ruang Wudhu Musholla	2	
38	Ruang Wudhu Musholla	2	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	X-Tal Detector	1	Rusak Berat
2	Mesin Ketik (11-13 inci)	1	Rusak Berat
3	Mesin Ketik (14-16 inci)	1	Rusak Berat
4	Mesin Fotocopy Folio	1	
5	Lemari Besi Metal	18	
6	Lemari Kayu	23	
7	Rak Besi	5	
8	Rak Kayu	3	
9	Filing Cabinet Besi	4	
10	Brandkas	2	
11	Tabung Pemadam Api	3	

12	CCTV	2	
13	Papan Visual/Papan Nama	12	
14	Whiteboard	2	
15	Mesin Absensi	2	
16	Hand Metal Detector	2	Rusak Berat
17	Infocus	1	
18	Meja Kayu	65	
19	Kursi Besi/Metal	169	
20	Kursi Kayu	23	
21	Sice	5	
22	Bangku Panjang Besi/Metal	30	
23	Meja Rapat	4	
24	Meja Komputer	16	
25	Tempat Tidur Kayu	1	
26	Meja Receptionis	3	
27	Mesin Pemotong Rumput	1	
28	Lemari Es	2	
29	AC Split	17	
30	Televisi	2	
31	Sound System	2	
32	Wireless	1	
33	Lambang Garuda Pancasila	2	
34	Tiang Bendera	8	

35	Tangga Aluminium	1	
36	Lambang Instansi	1	
37	Gordyn/Kray	3	
38	UPS	10	
39	Camera Digital	1	
40	Contact Printer	1	
41	Pesawat Telepon	11	
42	Faximile	2	
43	Komputer Jaringan Lainnya	1	
44	PC Unit	48	
45	Laptop	24	
46	Komputer Unit Lainnya	1	
47	Printer	28	
48	Scanner	3	
49	Server	2	
50	Router	1	
51	Rak Server	1	
52	Genset	1	
53	Alat Komunikasi lainnya	1	Alat bantu dengar
54	Komputer Jaringan lainnya	1	
55	Load Speaker	4	
56	Microphone	7	
57	LCD Monitor	1	

58	Tripod Camera	1	
59	Camera Video	2	
60	Contact Printer	1	
X.	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR		
1	Ruangan Ketua	1	-
2	Ruangan Wakil Ketua	1	-
3	Ruangan Hakim	1	-
4	Ruangan Panitera	1	-
5	Ruangan Sekretaris	1	-
6	Ruangan Sidang Umum	2	-
7	Ruang Sidang Teleconference	1	-
8	Ruangan Sidang Anak	1	-
9	Ruangan Kepaniteraan Pidana	1	-
10	Ruangan Kepaniteraan Perdata	1	-
11	Ruangan Kepaniteraan Hukum	1	-
12	Ruangan Kesekretariatan Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1	-
13	Ruangan Kesekretariatan umum dan keuangan	1	-
14	Ruangan Kesekretariatan kepegawaian, organisasi dan tata laksana	1	
15	Ruangan server	1	-
16	Ruangan mediasi	1	-
17	Ruangan posbakum	1	-
18	Ruangan ibu menyusui dan kesehatan	1	-

19	Ruangan tunggu anak	2	-
20	Ruangan tahanan pria	1	-
21	Ruangan tahanan wanita	1	-
22	Ruangan jaksa	1	-
23	Ruangan pengacara	1	-
24	Ruangan tunggu terbuka	1	-
25	Ruangan kasir	1	-
26	Ruangan panitera pengganti	1	-
27	Ruangan jurusita pengganti	1	-
28	Ruangan arsip	1	-
29	Ruangan Rapat	1	-
30	Pantri	1	-
31	WC	19	-
32	Pustaka	1	-
33	Ruangan bermain anak	1	-
34	Smoking Area	2	-
35	Gudang	3	-
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer	35	-
2	Laptop	36	-
3	Infokus	2	-
4	PABX	50	-
5	Mesin Ketik	12	-
6	Mesin Fotocopy	2	-

7	AC	56	-
8	Faximili	2	-
9	Genset	2	-
10	Printer	43	-
11	Lemari	40	-
12	Kursi	179	-
13	Meja komputer	12	-
14	Brangkas	3	-
15	Rak	7	-
16	Filing Cabinet	8	-
17	Kiosk	1	-
XI.	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
7	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang PTIP	1	
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
12	Ruang Dharmayukti Karini	1	
13	Ruang Persediaan	1	
14	Ruang Ajudan	1	

15	Ruang Sidang	3	
16	Ruang Tahanan	2	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Lobby	1	
19	Ruang Jaksa	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Polisi	1	
22	Ruang Laktasi	1	
23	Ruang Server	1	
24	Ruang Rapat	1	
25	Ruang Arsip	2	
26	Ruang Perpustakaan	1	
27	Ruang Barang Bukti	1	
	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Gerobak Dorong	1	B 0, RR 0, RB 1
2	Mesin Pompa Air Pmk	3	B 2, RR 0, RB 1
3	Mesin Ketik Manual Portabel	3	B 0, RR 0, RB 3
4	Mesin Ketik Manual Standar	2	B 0, RR 0, RB 2
5	Mesin Ketik Manual Langewagon	11	B 0, RR 0, RB 11
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	B 0, RR 0, RB 1
7	Mesin Stensil Manual Folio	1	B 0, RR 0, RB 1
8	Mesin Fotocopy Lainnya	1	B 0, RR 0, RB 1
9	Lemari Besi/metal	2	B 0, RR 0, RB 2
10	Lemari Kayu	62	B 14, RR 20, RB 28
11	Rak Kayu	4	B 0, RR 4, RB 0
12	Filing Cabinet Besi	3	B 0, RR 0, RB 3
13	Brandkas	3	B 1, RR 1, RB 1

14	Tabung Pemadam Api	6	B 4, RR 0, RB 2
15	Fire Alarm	1	B 1, RR 0, RB 0
16	CCTV	3	B 3, RR 0, RB 0
17	White Board	20	B 0, RR 0, RB 20
18	Mesin Absensi	2	B 1, RR 0, RB 1
19	Hand Metal Detector	2	B 0, RR 0, RB 2
20	Lcd Projector/infocus	2	B 1, RR 0, RB 1
21	Perkakas Kantor Lainnya	3	B 0, RR 0, RB 3
22	Meja Kerja Besi/metal	4	B 0, RR 0, RB 4
23	Meja Kerja Kayu	94	B 37, RR 23, RB 34
24	Kursi Besi/metal	139	B 72, RR 28, RB 39
25	Kursi Kayu	66	B 29, RR 8, RB 29
26	Sice	14	B 6, RR 2, RB 6
27	Bangku Panjang Kayu	14	B 0, RR 11, RB 3
28	Meja Rapat	12	B 0, RR 2, RB 10
29	Meja Komputer	5	B 0, RR 0, RB 5
30	Meja Ketik	4	B 0, RR 0, RB 4
31	Meja Telepon	2	B 0, RR 1, RB 1
32	Partisi	2	B 0, RR 2, RB 0
33	Jam Elektronik	13	B 0, RR 0, RB 13
34	Mesin Penghisap Debu	1	B 1, RR 0, RB 0
35	Mesin Pemetong Rumput	1	B 0, RR 1, RB 0
36	AC Split	20	B 18, RR 2, RB 0
37	Kipas Angin	1	B 0, RR 0, RB 1
38	Televisi	5	B 4, RR 0, RB 1
39	Amplifier	2	B 0, RR 0, RB 2
40	Loudspeaker	9	B 4, RR 0, RB 5
41	Sound System	4	B 2, RR 0, RB 2
42	Karaoke	1	B 0, RR 0, RB 1

43	Megaphone	1	B 0, RR 0, RB 1
44	Microphone	6	B 0, RR 0, RB 6
45	Microphone Table Stand	3	B 0, RR 0, RB 3
46	Unit Power Supply	3	B 3, RR 0, RB 0
47	Lambang Garuda Pancasila	3	B 0, RR 2, RB 1
48	Tiang Bendera	4	B 0, RR 2, RB 2
49	Tangga Aluminium	1	B 1, RR 0, RB 0
50	Kaca Hias	4	B 0, RR 0, RB 4
51	Palu Sidang	2	B 0, RR 2, RB 0
52	Lambang Instansi	2	B 1, RR 0, RB 1
53	Mini Compo	1	B 0, RR 0, RB 1
54	Intercom Unit	5	B 0, RR 0, RB 5
55	Microphone/Wireless Mic	2	B 1, RR 0, RB 1
56	UPS	4	B 4, RR 0, RB 0
57	Camera Digital	1	B 1, RR 0, RB 0
58	LCD Monitor	1	B 0, RR 0, RB 1
59	Telephone (pabx)	2	B 0, RR 0, RB 2
60	Pesawat Telephone	2	B 0, RR 0, RB 2
61	Facsimile	2	B 1, RR 0, RB 1
62	Internet	1	B 1, RR 0, RB 0
63	Komputer Jaringan Lainnya	1	B 1, RR 0, RB 0
64	PC Unit	59	B 31, RR 9, RB 19
65	Lap Top	26	B 17, RR 0, RB 9
67	Scanner	2	B 1, RR 0, RB 1
68	Server	2	B 2, RR 0, RB 0
69	Router	3	B 3, RR 0, RB 0
70	Wireless Access Point	1	B 1, RR 0, RB 0
71	Sumur Pemboran Air	1	B 0, RR 0, RB 1
72	Monografi	461	B 461, RR 0, RB 0

73	Software Komputer	2	B 2, RR 0, RB 0
74	Audio Mixing Console	1	B 1, RR 0, RB 0
75	Camera Conference	1	B 1, RR 0, RB 0
76	Genset	1	B 0, RR 1, RB 0
77	Audio Mixing Console	1	B 1, RR 0, RB 0
78	Telephone Mobile	1	B 1, RR 0, RB 0
79	Genset	1	B 0, RR 0, RB 1
XII.	PENGADILAN NEGERI SOLOK		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Sidang Utama	1	-
7	Ruang Sidang Dua	1	-
8	Ruang Sidang Anak	1	-
9	Ruang Mediasi	1	-
10	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
11	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
12	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	-
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	-
15	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-
16	Ruang Server	1	-
17	Ruang Posbakum	1	-
18	Ruang Perpustakaan	1	-
19	Ruang Arsip	1	-
20	Ruang Jaksa/BAPAS	1	-
21	Ruang Tahanan	2	-

22	Ruang Barang Bukti	1	-
23	Ruang Laktasi	1	-
24	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	-
25	Ruang Kasir	1	-
26	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-
27	Meja Informasi	1	-
28	Pojok e-Court	1	
29	Ruang Tunggu	1	
30	Toilet Difabel	1	
31	Toilet Ketua	1	
32	Ruang Dharmayukti Karini	1	
33	Ruang Tamu Terbuka	1	
34	Ruang Tunggu Anak Saksi/Korban	1	
SARANA / PRASARANA GEDUNG			
1	Mesin Pompa Air PMK	1	
2	Mesin Fotocopy Folio	2	2 Rusak Berat.
3	Lemari Kayu	9	4 Rusak Berat.
4	Rak Besi	5	
5	Brandkas	2	
6	CCTV	18	
7	Hand Metal Detector	1	
8	Mesin Absensi	1	
9	LCD Projector/Infocus	1	1 Rusak Berat.
10	Meja Kerja Kayu	46	
11	Kursi Besi/Metal	97	
12	Kursi Kayu	17	
13	Sice	1	
14	Meja Rapat	2	
15	Meja Komputer	4	

16	Meja Resepsionis	1	
17	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
18	Mesin Pemotong Rumput	2	
19	Lemari Es	3	
20	A.C Split	15	
21	Treng Air/Tandon Air	1	
22	Televisi	9	2 Rusak Berat.
23	Loudspeaker	4	
24	Sound System	3	
25	Wireless	1	
26	Microphone	7	
27	Lambang Garuda Pancasila	1	
28	Tiang Bendera	6	
29	Palu Sidang	1	
30	Lambang Instansi	1	
31	Vertikal Blind	3	
32	Bingkai Foto	2	
33	Bracket Standing Peralatan	1	
34	Audio Mixing Console	1	
35	Uninterruptible Power Supply (ups)	7	
36	Camera Digital	2	
37	Video Conference	1	
38	LCD Monitor	2	
39	Camera Conference	1	
40	Telephone (PABX)	1	
41	Facsimile	2	1 Rusak Berat.
42	Telepon Analog	8	
43	Genset	1	
44	Komputer Jaringan Lainnya	1	

45	P.C Unit	35	
46	Laptop	30	
47	Printer	12	5 Rusak Ringan.
48	Scanner	2	
49	Server	4	2 Rusak Berat.
50	Router	1	
51	Rak Server	2	
52	Peralatan Jaringan Lainnya	1	
53	Monografi	61	
XIII.	PENGADILAN NEGERI KOTO BARU		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Sidang I	1	-
7	Ruang Sidang II	1	-
8	Ruang Sidang Anak	1	-
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	-
13	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	-
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	-
15	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1	-
16	Ruang Arsip Hukum	1	-
17	Ruang Tunggu Anak	1	-
18	Ruang Konseling Anak	1	-
20	Ruang Mediasi/ Diversi	1	-
21	Ruang Tamu Terbuka	1	-

22	Ruang Jaksa	1	-
23	Ruang Server	1	-
24	Ruang Posbakum	1	-
25	Ruang Perpustakaan	1	-
26	Ruang Tunggu Pengunjung	1	-
27	Ruang Tahanan Pria	1	-
28	Ruang Tahanan Wanita	1	-
29	Ruang Mushalla	1	-
30	Toilet Ketua	1	-
31	Toilet Wakil Ketua	1	-
32	Toilet Disabilitas	1	-
33	Toilet Panitera	1	-
34	Toilet Pegawai	1	-
35	Toilet Pengunjung	1	-
36	Toilet Tunggu Anak	1	-
37	Toilet Konseling Anak	1	-
	Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Station Wagon	1	-
2	Sepeda Motor	6	-
3	Mesin Fotocopy Folio	1	-
4	Lemari Kayu	32	Rusak Ringan
5	Rak Besi	10	-
6	Filling Cabinet Besi	16	-
7	Brangkas	2	-
8	CCTV-Camera Control Television System	1	-
9	Papan Visual / Papan Nama	6	-
10	White Board	12	-
11	Peta	1	-
12	Mesin Absensi	2	-
13	Meja Kerja Besi/Metal	17	Rusak Ringan
14	Meja Kerja Kayu	38	Rusak Ringan

15	Kursi Besi/Metal	44	-
16	Kursi Kayu	66	-
17	Sice	4	-
18	Bangku Panjang Kayu	27	-
19	Meja Rapat	19	-
20	Meja Komputer	8	-
21	Meja Resepsionis	2	Rusak Ringan
22	Kursi Fiber Glas/Plastik	27	-
23	Mesin Potong Rumput	1	-
24	Lemari Es	1	-
25	A.C Split	26	-
26	Kipas Angin	6	-
27	Televisi	6	-
28	Sound System	1	-
29	Loud Speaker	4	-
30	Microphone	7	-
31	Lambang Garuda Pancasila	2	-
32	Tiang Bendera	8	-
33	Kaca Hias	1	-
34	Palu Sidang	2	-
35	Lambang Instansi	1	-
36	Uninterruptible Power Suply (UPS)	8	-
37	Bracket Standing	1	-
38	Audio Mixing Console	1	-
39	Video Conference	1	-
40	LCD Monitor	2	-
41	Camera Conference	1	-
42	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	-
43	Facsimile	1	-
44	Local Battery Telephone	1	-
45	Genset	1	-

46	Local Area Network (LAN)	4	-
47	Komputer Jaringan Lainnya	1	-
48	P.C Unit	34	-
49	Lap Top	21	-
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	-
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	-
52	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	-
53	Server	2	-
54	Router	2	-
XIV	PENGADILAN NEGERI MUARO		
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Sidang Umum	2	-
7	Ruang Sidang Anak	1	-
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
11	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	-
12	Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	-
13	Ruang Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	-
14	Ruang Perpustakaan	1	-
15	Ruang Server	1	-
16	Ruang Tahanan	2	-
17	Ruang Laktasi	1	-
18	Ruang Arsip Perkara	3	-

19	Ruang Posbankum	1	-
20	Ruang Jaksa	1	
21	Ruang Mediasi	1	
22	Ruang Media Center	1	
23	Toilet	5	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Server	2	-
2	Komputer	28	-
3	Laptop	18	-
4	Scanner	1	-
5	Infocus	1	-
6	PABX	1	-
7	Mesin Ketik	2	-
8	Mesin Fotocopy	1	-
9	AC	24	-
10	Faximile	1	-
11	Genset	1	-
12	Printer	25	-
13	Lemari Besi	10	-
14	Lemari Kayu	10	
15	Kursi (Besi/Kayu/Fiber/Plastik/Bangku Panjang)	80	-
16	Si Ce	4 Set	
17	Meja (Kerja/Rapat/Komputer/Besi/Kayu)	50	-
18	Brangkas	2	-
19	Rak Besi	5	-
20	Rak Kayu	5	
21	Filing Cabinet	5	-
22	Tabung Pemadam Api (APAR)	3	-

23	CCTV	2	-
24	Papan Nama	2	-
25	Mesin Absen (Fingerprint)	1	-
26	Kios-K	1	-
27	TV	1	-
28	Mixer Audio	1	-
29	Speaker Active	5	-
30	Speakerphone	1	-
31	Camera Untuk Virtual Meeting	1	-
XV.	PENGADILAN NEGERI PAINAN		
1	Ruang Ketua	1	hakim
2	toilet ketua	1	
3	Ruang Wakil Ketua	1	
4	ruang hakim	1	
5	toilet hakim	1	
6	Ruang Panitera	1	panitera
7	ruang kepaniteraan pidana	1	
8	ruang kepaniteraan perdata	1	
9	ruang kepaniteraan hukum	1	
10	ruang jurusita	1	
11	ruang arsip	1	
12	Ruang Sekretaris	1	sekretaris
13	ruang sub bagian umum keuangan	1	
14	ruang sub bagian perencanaan, teknologi informasi, pelaporan	1	
15	ruang sub bagian kepegawaian, organisasi, tata laksana	1	
16	ruang server	1	
17	ruang pustaka	1	
18	Ruang Sidang Utama	1	perkara

19	ruang sidang atas	1	
20	ruang sidang anak	1	
21	ruang mediasi	1	
22	ruang tahanan pria	1	
23	ruang tahanan wanita	1	
24	ruang tunggu anak	1	
25	ruang polisi	1	
26	ruang jaksa	1	
27	ruang hakim anak	1	
28	ruang kesehatan	1	publik
29	ruang tunggu terbuka hijau	1	
30	mushola	1	
31	toilet pegawai pria	1	
32	toilet pegawai wanita	1	
33	gudang	1	
34	ruang tamu terbuka	1	
35	ruang posbakum	1	
36	ruang pelayanan terpadu satu pintu	1	
37	ruang laktasi	1	
38	toilet pengunjung pria	1	
39	toilet pengunjung wanita	1	
40	kantin	1	
41	lapangan tenis	1	
42	garasi mobil dinas	1	
43	garasi motor pegawai	1	
	Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Genset	1	
2	lemari besi	26	

3	lemari kayu	33	4 Rusak Ringan
4	rak besi	25	
5	filing kabinet besi	13	5 Rusak Ringan
6	brankas	3	1 Rusak Ringan
7	mobile file	2	
8	tabung pemadam api	4	1 Rusak
9	cctv	1	
10	papan nama	2	
11	alat penghancur kertas	1	
12	mesin absensi	1	
13	meja kerja kayu	70	2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
14	kursi besi	107	12 Rusak Ringan
15	kursi kayu	21	3 Rusak Ringan
16	sice	2	
17	bangku panjang besi	9	
18	bangku panjang kayu	7	
19	meja rapat	2	
20	meja resepsionis	1	
21	meja telepon	1	
22	meubelair lainnya	3	
23	jam elektronik	13	4 Rusak Ringan
24	vacum cleaner	2	
25	lemari es	3	
26	ac standing	4	
27	ac split	30	
28	kipas angin	11	1 Ringan
29	televisi	2	
30	sound system	1	
31	mic conference	2	

32	kaca hias	6	
33	dispenser	13	
34	palu sidang	3	
35	lambang instansi	1	
36	ups	16	
37	camera digital	1	
38	pabx	1	
39	facsimile	2	
40	lan	1	
41	komputer jaringan lainnya	1	
42	pc unit	45	1 Rusak ringan
43	laptop	23	
44	printer	19	
45	scaner	3	
46	peralatan pc lainnya	1	
47	server	2	
48	router	1	
49	rak server	1	
50	monografi	5.839	
XVI.	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	

9	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1	
11	Ruang Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	
12	Ruang Sidang Cakra	1	
13	Ruang Sidang Candra	1	
14	Ruang Sidang Sari	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Server	1	
17	Ruang Tamu Terbuka	2	
18	Ruang Tahanan	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tahanan Pria • Ruang Tahanan Wanita
19	Ruang Tunggu Anak	1	
20	Ruang Klinik	1	
21	Ruang Menyusui (Laktasi)	1	
22	Ruang Tunggu Jaksa	1	
23	Ruang Posyankum	1	
24	Ruang Tunggu Pengacara	1	
25	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	
26	Ruang Kaukus	1	
27	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	
28	Ruang Arsip Kesekretariatan dan pustaka	1	
29	Ruang Tunggu Hakim	1	
30	Ruang Comand Centre	1	
31	Toilet	10	
32	Mushalla	1	
33	Kantin	1	
34	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	
35	Toilet difabel	2	

	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Fotocopy Folio	1	APBN
2	Transportable Generating Set	2	DIPA
3	Lemari Besi/ Metal	21	APBN
4	Lemari Kayu	23	APBN
5	Filling Cabinet Besi	12	DIPA dan APBN
6	Brandkas	2	APBN dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
7	Roll Opek	3	DIPA dan APBN
8	CCTV	2	DIPA
9	Papan Visual/Papan Nama	2	APBN dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
10	Mesin Absensi	1	APBN
11	Hand Metal Detector	1	Mahkamah Agung Republik Indonesia
12	Lcd Projector/ Infocus	1	Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
13	Papan Pengumuman	1	DIPA
14	Meja Kerja Kayu	44	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
15	Kursi Besi/ Metal	119	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
16	Kursi Kayu	34	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
17	Sice	6	APBN dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
18	Bangku Panjang Kayu	9	APBN
19	Meja Komputer	4	APBN
20	Meja Resepsionis	1	DIPA
21	Kasur/Spring Bed	3	APBN
22	Publik Astari (pembatas antrian)	1	APBN
23	Lemari Es	1	APBN
24	Lemari Es	2	Daftar Barang Pihak Ketiga
25	A.C. Split	22	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
26	Kipas Angin	10	APBN dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat

27	Televisi	4	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
28	Loud Speaker	1	Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
29	Sound System	2	DIPA dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
30	Stabilisator	1	APBN
31	Lambang Instansi	1	BUA
32	Gordyin/kray	1	APBN
33	Bracket Standing Peralatan	1	Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
34	Tangki Air	2	DIPA
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	DIPA PN Pasaman Barat dan DIPA BUA Mahkamah Agung Republik Indonesia
36	Camera Digital	1	APBN
37	Mesin Potong	1	APBN
38	Telephone PABX	1	APBN
39	Finger Printer Time abd Attendance Acces Control System	2	DIPA
40	Internet	1	APBN
41	Komputer Jaringan Lainnya	1	DIPA BUA Mahkamah Agung Republik Indonesia
42	P.C Unit	21	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
43	Lap Top	11	DIPA dan APBN
44	Scanner Peralatan Mini Komputer	1	DIPA
45	Printer Peralatan Personal Komputer	21	DIPA , APBN, dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
46	Scanner Peralatan Personal Komputer	1	DIPA
47	Server	3	DIPA PN Pasaman Barat, DIPA BUA Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hibah Pemda Kab. Pasaman Barat
48	Router	1	DIPA
49	Rak Server	1	DIPA BUA Mahkamah Agung Republik Indonesia
50	Software Komputer	1	DIPA PN Pasaman Barat

XVII.	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG		
1	Ruang Ketua	1	B
2	Ruang Wakil Ketua	1	B
3	Ruang Hakim	4	B
4	Ruang Panitera	1	B
5	Ruang Sekretaris	1	B
6	Ruang Sidang Umum	1	B
7	Ruang Sidang Pidana	1	B
8	Ruang Sidang Perdata	1	B
9	Ruang Sidang Anak	1	B
10	Ruang Panitera Pengganti	2	B
11	Ruang Jurusita	1	B
12	Ruang Kesekretariatan (ZI/RB/APM)	1	B
13	Ruang Kortala	1	B
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	B
15	Ruang PTIP	1	B
16	Ruang Pidana	1	B
17	Ruang Perdata	1	B
18	Ruang Hukum	1	B
19	Ruang Rapat	1	B
20	Ruang Command Center	1	B
21	Ruang Dharmayukti	1	B
22	Ruang Server	1	B
23	Ruang Tunggu + Selasar	1	B
24	Ruang PTSP	1	B
25	Ruang Arsip	2	B
26	Ruang Tahanan	1	B
27	Lobby Utama	1	B

28	Gudang	1	B
29	Ruang Posbakum	1	B
30	Bank	1	B
31	Ruang Jaksa	1	B
32	Ruang Barang Bukti	1	B
33	Ruang Kesehatan	1	B
34	Ruang Mediasi & Kaukus	1	B
35	Ruang Tunggu Anak Laki-Laki	1	B
36	Ruang Tunggu Anak Perempuan	1	B
37	Ruang Tunggu Sidang	1	B
38	Ruang Pengacara	1	B
39	Ruang Jaksa	1	B
40	Ruang Diversi	1	B
41	Ruang Bapas	1	B
42	Ruang Teleconference	1	B
43	Ruang Saksi Korban	1	B
44	Ruang Perpustakaan	1	B
45	Ruang Laktasi dan Bermain Anaka	1	B
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Besi/Metal	34	B
2	Lemari Kayu	5	B
3	Rak Besi	10	B
4	Mobile File	3	B
5	White Board	1	B
6	Mesin Absensi	1	B
7	Meja Kerja Kayu	89	B
8	Kursi Besi/Metal	379	B
9	Kursi Kayu	21	B
10	Meja Rapat	1	B

11	Tempat Tidur Besi	1	B
12	Meja Resepsionis	2	B
13	Sofa	17	B
14	Meubelair Lainnya (Meja Tamu	5	B
15	A.C Split	6	B
16	Loudspeaker	4	B
17	Microphone	7	B
18	Lambang Garuda	3	B
19	Tiang Bendera	4	B
20	Mimbar/Podium	1	B
21	Bracket Standing Peralatan	1	B
22	Audio Mixing Consule	1	B
23	UPS	5	B
24	LCD Monitor	1	B
25	Camera Conference	1	B
26	PABX	1	B
27	P.C Unit	19	B
28	Lap Top	15	B
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	B
30	Server	2	B
31	Router	2	B
32	Wireless Access Point	2	B
33	Switch	2	B
34	Lemari Besi/Metal	34	B
35	Lemari Kayu	5	B
36	Rak Besi	10	B
37	Mobile File	3	B
38	White Board	1	B
39	Mesin Absensi	1	B

40	Meja Kerja Kayu	89	B
41	Kursi Besi/Metal	379	B
42	Kursi Kayu	21	B
43	Meja Rapat	1	B
44	Tempat Tidur Besi	1	B
45	Meja Resepsionis	2	B
46	Sofa	17	B
47	Meubelair Lainnya (Meja Tamu	5	B
48	A.C Split	6	B
49	Loudspeaker	4	B
50	Microphone	7	B
51	Lambang Garuda	3	B
52	Tiang Bendera	4	B
53	Mimbar/Podium	1	B
54	Bracket Standing Peralatan	1	B
55	Audio Mixing Consule	1	B
56	UPS	5	B
57	LCD Monitor	1	B
58	Camera Conference	1	B
59	PABX	1	B
60	P.C Unit	19	B
61	Lap Top	15	B
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	B
63	Server	2	B
64	Router	2	B
65	Wireless Access Point	2	B
66	Switch	2	B

2) Sarana/Prasarana Kantor

RUMAH DINAS

	PENGADILAN	KETUA	WAKIL KETUA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	KONDISI			JUMLAH
							BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	5	1	1	5	3	2	10
1	Pengadilan Negeri Padang	1	1	9	1	-	10	-	2	12
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	6	1	-	1	8	-	9
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	13	1	1	1	16		17
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	9	1	-	11		1	12
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	6	1	-	9			9
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	1	7	1	1	11			11
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	1	6	-	-	8			8
8	Pengadilan Negeri Solok	1	1	7	1	-	10			10

9	Pengadilan Negeri Painan	1	1	6	1	1	10			10
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	1	1	7	1	1	9	2		11
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	3	1	1	7			7
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	1	1		4			4
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	4	1	1	8			8
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	3	1	1	6		1	7
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	1	1	1	5			5
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-	-				
Total		16	16	93	15	9	115	29	6	150

KENDARAAN DINAS

NO	PENGADILAN	KENDARAAN RODA 4				KENDARAAN RODA 2			
		KONDISI			JUMLAH	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	Pengadilan Tinggi Padang	4	4	1	9	1	4	4	9
1	Pengadilan Negeri Padang	3			3	10	1		11
2	Pengadilan Negeri Pariaman		2		2	1	5	1	7
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	2	4	3	4	1	8
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	3			1 unit pinjam pakai pemda	7			7
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	3			1 unit pinjam pakai dari pemko Payakumbuh	5			5
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2			2	5	1		6
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	4			4	6		1	7
8	Pengadilan Negeri Solok	3	1		1 unit pinjam pakai pemda	5			5

9	Pengadilan Negeri Painan	4			4	8			8
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	1		1 unit pinjam pakai pemda		7	1	8
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	2	1		1 unit pinjam pakai pemda	6	1		7
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	4			4	8		1	9
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1			1	6			6
14	Pengadilan Negeri Muaro	4			4	10			10
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat		4		2 unit pinjam pakai pemda		4		2 unit pinjam pakai pemda
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	4			1 unit pinjam pakai pemda, 1 unit sewa	2			2
Total									

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi informasi sudah mencapai berbagai bidang kehidupan masyarakat. Teknologi informasi memudahkan para penggunanya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu dan memecahkan masalah, diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu, kreativitas, dan problem solving (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi informasi, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat dan efektif, termasuk di dunia peradilan seperti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat.

1. Implementasi e-Court di Pengadilan

Ecourt merupakan sebuah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 yaitu Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi ecourt merupakan sebuah sistem terpusat, artinya aplikasi tersebut berada dalam server Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga tidak perlu di instal di masing-masing server maupun website Pengadilan.

Persidangan secara elektronik atau e-court merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 4 ruang lingkup yaitu, e-filling (pengisian data pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar perkara), e-summons, (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili elektronik), e-litigasi (persidangan secara online). E-Court baru terlaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama, sementara untuk Pengadilan Tingkat Banding belum ada. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat telah menerapkan Aplikasi e-Court ini dalam hal pendaftaran, dan persidangan secara

online. Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri yang memasukkan pendaftaran melalui e-court dapat dilihat pada tabel berikut:

**DAFTAR PERKARA PENGADILAN NEGERI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan	Total E-Litigasi
1	PN Padang	1.800	1.787	652	160	24	949	190
2	PN Painan	184	166	143	17	3	3	30
3	PN Kotobaru	204	199	87	27	7	78	31
4	PN Solok	285	284	54	7	1	222	10
5	PN Sawahlunto	42	42	11	6	0	25	1
6	PN Muaro	88	88	24	32	0	32	8
7	PN Padang Panjang	103	103	26	11	1	65	5
8	PN Batusangkar	199	198	95	18	3	82	13
9	PN Bukittinggi	310	303	126	21	3	153	51
10	PN Payakumbuh	294	287	101	25	8	153	53
11	PN Tanjung Pati	183	167	68	8	3	88	28
12	PN Pariaman	479	473	241	63	6	163	71
13	PN Lubuk Basung	271	267	109	65	1	92	57
14	PN Pasaman Barat	668	665	150	41	0	474	35
15	PN Lubuk Sikaping	136	133	54	2	0	77	8
16	PN Pulau Punjung	94	94	29	43	0	22	1

2. Implementasi SIPP di Pengadilan

Melalui dukungan teknologi informasi, Pengadilan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja dibawahnya yakni Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat, secara keseluruhan telah menerapkan SIPP versi 5.1.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Padang maupun SIPP Mahkamah Agung dan juga Direktori Putusan Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Padang meliputi :

- 1) LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel pada beberapa ruangan.
- 2) Jaringan Internet Astinet kapasitas 4 Mbps (2 line telepon) yang di-*sharing* untuk 2 lantai menggunakan WiFi.

Pada tahun 2022, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sudah diupdate ke versi 5.1.1. Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk melakukan perubahan saat ini Pengadilan Tinggi Padang membulatkan tekad, dan memulai memetakan (*mapping*) potensi sumber daya, kekuatan, kelemahan dan resistensi. Selanjutnya beragam langkah dilakukan agar semua kelemahan dapat diatasi dengan kekuatan yang ada.

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang, serta mengelompokkan menjadi sebelas kegiatan, yaitu:

- Pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari KKN serta peningkatan pelayanan publik.

- Pembangunan Zona Integritas. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara terbuka. Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan Pembangunan Pembangunan Zona Integritas tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik.
- Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna.
- Pembenahan Administrasi. Acuanya adalah Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari, tetapi umumnya tetap banyak yang terlupakan. Untuk pembenahan administrasi ini, Pengadilan Tinggi Padang mengandalkan aplikasi-aplikasi, baik yang merupakan aplikasi resmi dari Mahkamah Agung, maupun aplikasi dari instansi eksternal.
- Pembuatan dan pengesahan Dokumen Penjaminan Mutu. Dokumen ini meliputi Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, Motto, Struktur Organisasi Penjaminan Mutu, Manual Mutu, Instruksi Kerja (IK), Manajemen Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit. Untuk efektifitas penyusunan maka Pengadilan Negeri Pariaman sudah membentuk Tim Penyusunan SOP dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Penyusunan SOP berpedoman

pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
- Pelaksanaan Asesmen Internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan asesmen internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.
- Asesmen oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan asesmen oleh TAPM Badilum, maka harus meminta asesmen oleh Pengadilan Tinggi. Rekomendasi Pengadilan Tinggi harus segera ditindaklanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan asesmen akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon asesmen akreditasi TAPM Badilum.

- Sebelum diberi penilaian atau pun diasesmen, Pengadilan Tinggi Padang melaksanakan pembinaan yang berbarengan dengan pengawasan ke seluruh satuan kerja yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang (Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat) yaitu terdapat 16 (enam belas) Pengadilan Negeri. Dimana untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut Pengadilan Tinggi Padang telah meminta tambahan anggaran yakni sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) telah terealisasi 100% dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan pelaksanaannya.
- Hal ini merupakan capaian bagi Pengadilan Tinggi Padang terutama terhadap kinerja yang telah terealisasi dengan sangat baik.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan terhadap dunia peradilan, maka Mahkamah Agung sendiri telah memerintahkan seluruh jajaran peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program Mahkamah Agung R.I dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Pengadilan Tinggi Padang telah meresmikan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan konsep baru pada Bulan September tahun 2022, yang diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyediakan pelayanan yang terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan. Pelayanan PTSP terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu: Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan layanan prioritas kepada kaum rentan yang terdiri dari disabilitas, ibu hamil, lansia dan anak-anak. Pengadilan tinggi Padang menyediakan fasilitas berupa tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu prioritas, kursi roda dan alat bantu jalan bagi disabilitas fisik, buku panduan dengan metode braile dan memberikan pelayanan dengan kartu tamu prioritas.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Pegawai, terutama bagi pegawai yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Security. Pelatihan bahasa isyarat ini mendukung prinsip *equality before the law*. Diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Padang dapat menjangkau semua kalangan. Sementara itu tentang PTSP ini telah diterapkan pula kepada seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Padang. Pada tahun 2022, ada 2 Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan penghargaan dalam penilaian lomba PTSP yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yaitu:

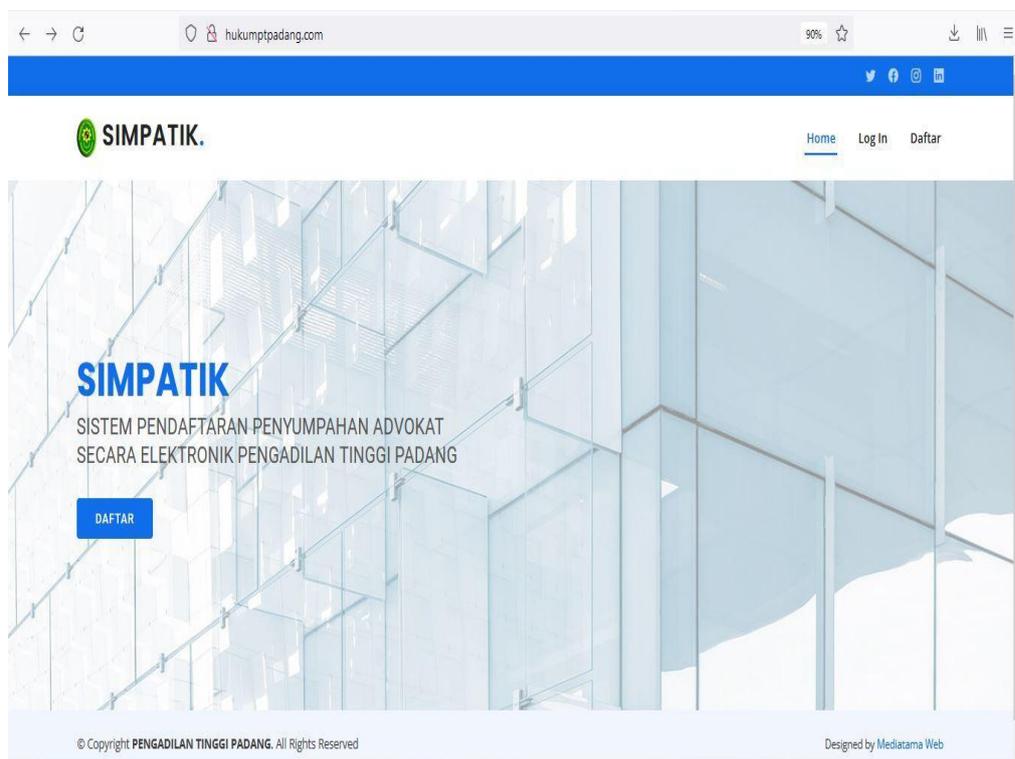
NO	Pengadilan Negeri	Peringkat	Kategori
1.	Pengadilan Tinggi Padang	Harapan II	PTSP Terbaik se-Indonesia (Kategori Pengadilan Tinggi)
2.	Pengadilan Negeri Padang	Harapan I	PTSP Terbaik se-Indonesia (Kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A)

C. Inovasi Pelayanan Publik

Ada beberapa inovasi terkait pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2022 baik berupa aplikasi atau berupa program kegiatan yang tujuannya memudahkan masyarakat pencari keadilan dan instansi terkait untuk mendapatkan pelayanan terkait produk hukum dari Pengadilan Tinggi Padang. Berikut beberapa inovasi yang telah berjalan pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2022 :

1. SIMPATIK

Simpatik merupakan aplikasi untuk mempermudah pendaftaran advokat secara online dan segera mendapatkan jadwal untuk dilakukan penyempahan.



No.	Nama Organisasi	Tanggal Penyempahan	Jumlah Penyempahan	Ket
1.	PERADI	30 Maret 2022	70 Orang	
2.	KAI	30 Maret 2022	13 Orang	
3.	DPN INDONESIA	25 Mai 2022	20 Orang	
4.	PPKHI	2 Juni 2022	7 Orang	
5.	PERADI PERJUANGAN	2 Juni 2022	3 Orang	
6.	KAI	13 September 2022	1 Orang	
7.	PERADIN	6 Oktober 2022	2 Orang	
8.	PPKHI	15 Desember 2022	5 Orang	
9.	PERADAN	15 Desember 2022	2 Orang	
10.	PERADI	15 Desember 2022	62 Orang	
Jumlah			185 Orang	

2.SIBUNDA

SIBUNDA merupakan singkatan dari Sistem Bundel Data Administrasi. SIBUNDA merupakan inovasi berupa aplikasi yang memuat mengenai izin keluar kantor dan backup data administrasi. Melalui aplikasi SIBUNDA pegawai pada lingkungan Pengadilan Tinggi Padang yang akan mengajukan izin keluar kantor tidak perlu menggunakan form manual lagi. Tentunya ini mempermudah proses perizinan dan mendukung gerakan *paper less*.

3.KPT Menyapa

KPT Menyapa merupakan salah satu program yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Kegiatan ini dilakukan secara Daring melalui aplikasi *zoom meeting*, Ketua Pengadilan Tinggi Padang mengundang Pengadilan Negeri secara acak untuk bergabung dalam zoom meeting. Dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan kesempatan kepada Pengadilan Negeri untuk menyampaikan permasalahan ataupun kendala yang dialami terkait tugas dan fungsi Pengadilan.

4.SIPENSI

SIPENSI merupakan singkatan dari Aplikasi Pengajuan Riset Ilmiah. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para mahasiswa dan peneliti yang akan mengajukan permohonan izin riset pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Aplikasi ini dapat diakses melalui www.pt-padang.go.id/sipensi.

5.APOLAY

APOLAY merupakan singkatan dari Aplikasi Pojok Layanan. Aplikasi ini memuat semua *link* inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Aplikasi ini dapat diakses melalui www.pt-padang.go.id/apolay.

6.INOVASI DISABILITAS

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak ini meliputi sarana dan prasarana serta pelayanan. Pengadilan Tinggi Padang telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas. Diantaranya, tersedianya parkir khusus bagi penyandang disabilitas, kursi roda dan alat bantu jalan bagi disabilitas fisik, alarm darurat, kartu tamu prioritas, ruang tunggu prioritas, alat bantu dengar, toilet disabilitas, buku panduan dengan huruf braille dan buku etika berperilaku bagi penyandang disabilitas. Selain itu, untuk menunjang pelayanan kepada disabilitas, Pengadilan Tinggi Padang juga telah melakukan pelatihan bahasa isyarat bagi para petugas PTSP dan petugas keamanan yang ada di Pengadilan Tinggi Padang. Berikut, beberapa gambar yang menunjukkan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas:



INOVASI PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	Nama Satker	Inovasi	Keterangan
1	Pengadilan Negeri Kotobaru	a. Antrian PTSP b. Lanprio (Layanan Prioritas)	<p>Antrian PTSP bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pengunjung. Selain itu antrian PTSP juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya antri dan tertib. Setelah mendapatkan pelayanan dari pihak Pengadilan Negeri Koto Baru, pengunjung diarahkan untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari pengunjung.</p> <p>Lanprio (Layanan Prioritas) merupakan sebuah inovasi dalam hal pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas dan juga kelompok rentan. Inovasi ini memudahkan bagi para masyarakat dalam hal menjangkau layanan pengadilan, seperti informasi produk pengadilan, konsultasi hingga <i>booking</i> pelayanan PTSP yang</p>

		<p>terintegrasi dengan whatsapp dan juga zoom sehingga memudahkan dalam hal fleksibilitas.</p> <p>c. Pelana (Pendaftaran Layanan non Advokat)</p> <p>d. Panggilan Sidang</p> <p>e. Media Sosial Resmi Pengadilan Negeri Koto Baru</p> <p>f. CCTV</p> <p>g. Video Conference</p>	<p>Meningkatnya penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)</p> <p>Pelana (Pendaftaran Layanan non Advokat) merupakan inovasi Pengadilan Negeri Koto Baru untuk membantu para masyarakat pencari keadilan mengakses e-court non advokat secara online. Sehingga memudahkan dalam hal pendaftaran akun e-court bagi para pihak.</p> <p>Pangsid (panggilan sidang) merupakan sebuah inovasi yang memudahkan jalannya persidangan dimana Aplikasi ini membuat panggilan bagi para pihak, jaksa penuntut umum, panitera pengganti maupun majelis hakim untuk memulai agenda persidangan pada Ruang Sidang Tertentu tanpa bantuan operator untuk memanggil para pihak yang berperkara.</p>
--	--	---	--

		<p>h. Mext SIPP</p>	<p>mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara Elektronik untuk perkara pidana. Lahirnya PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada Tanggal 29 September 2020, membuat jalan persidangan perkara pidana makin Pasti dilaksanakan khusus terhadap perkara perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.</p> <p>Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum. Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi external Mahkamah Agung seperti akses aplikasi ecourt, akses aplikasi</p>
--	--	---------------------	---

			direktori putusan, akses aplikasi Siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.
2	Pengadilan Negeri Muaro	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi Si Super b. Aplikasi Sentrik (Aplikasi Sistem Antrian Pada Meja PTSP secara Elektronik) c. Aplikasi Si Edo (Sistem Informasi E-Dokumen) d. Aplikasi KDSlip 	
3	Pengadilan Negeri Payakumbuh	a. SIJANIAH (Sistem Informasi Jendela Layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh)	Aplikasi SIJANIAH akan menampilkan berbagai informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh termasuk Penelusuran Informasi Perkara, Aplikasi ini bersifat eksternal yang dapat diakses oleh masyarakat Pengguna Layanan dengan menggunakan smarphone dan terinstal pada app Play Store.
4.	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	a. Aplikasi Dashboard Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Aplikasi dashboard ini akan menampilkan rasio penanganan perkara yang berasal dari proses penanganan perkara di SIPP. Inovasi ini memudahkan hakim dan panitera pengganti dalam melakukan kontrol terhadap proses perkara yang sedang dalam

			<p>perpanjangan penahanan, izin sita dan geledah serta izin besuk, izin keluar dan izin bantaran, surat dakwaan dan surat tuntutan.</p>
		d. Pelayanan PTSP Mini	<p>Selain pelayanan PTSP yang berada di gedung kantor utama, pelayanan PTSP juga diterapkan pada gedung ruang sidang zitting plaatz Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berada di kecamatan Suliki. Pelayanan yang ada pada PTSP mini tidak ada bedanya dengan pelayanan PTSP pada gedung kantor, semua nya sama dalam hal pelayanan, mulai dari surat masuk, permohonan surat keterangan, penerimaan berkas perkara dan penerimaan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan PTSP.</p>
		e. Pelayanan SARILAMAK	<p>SARILAMAK adalah singkatan dari Sarana Transportasi Disabilitas Mencari Keadilan. Layanan SARILAMAK merupakan inovasi pelayanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Layanan SARILAMAK dapat digunakan</p>

			<p>penyandang disabilitas dimana Penyandang disabilitas nanti dijemput ke Kantor Kecamatan dan diantarkan kembali untuk mendapatkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Layanan SARILAMAK dapat digunakan oleh pencari keadilan secara Gratis di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Jarak maksimal 45 KM dari kantor Pengadilan, yaitu Kecamatan Bukit Barisan, Guguk, Gunung Omeh, Harau, Mungka, Pangkalan Koto Baru, dan Suliki.</p>
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	<p>a. Aplikasi SIDONA (Aplikasi Dokumen Zona Integritas)</p> <p>b. Mext SIPP dan Ment SIPP</p>	<p>Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengumpulan laporan bulanan pengembangan kompetensi pegawai yang akuntabel dan dokumen berupa SK, notulen rapat, SOP dan PKP untuk semua pegawai yang bermanfaat dalam pengumpulan dokumen zona integritas maupun kepentingan lainnya.</p> <p>Aplikasi Mint SIPP untuk aparatur Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Mext SIPP untuk masyarakat pencari keadilan.</p>

		<p>c. Mall Pelayan Publik</p>	<p>Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi eksternal Mahkamah Agung seperti akses aplikasi ecourt, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.</p> <p>Website ini disediakan untuk mempermudah petugas MPP dan Para Pencari Keadilan yang datang ke MPP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang terletak di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto. Website ini menyediakan Info berupa TILANG dan telah dilink ke website PN Sawahlunto, e-Berpadu, Tilang, Eraterang, e-Court, dan SIPP. Dengan tersedianya website ini, masyarakat lebih cepat dalam menerima layanan dan lebih mudah dalam mengakses layanan yang disediakan oleh Pengadilan. Website MPP (Mall Pelayanan Publik) beralamat di https://mpp.pn-sawahlunto.go.id/.</p>
--	--	-------------------------------	--

		<p>g. Audio Peringatan Anti Gravitasi</p> <p>h. Inovasi bagi penyandang disabilitas</p>	<p>Para pihak atau kuasanya harus berkendara setidaknya sejauh 5 km untuk menuju bank terdekat, setelah sampai di bank para pihak atau kuasanya pun harus antri sekian lama bahkan bisa berjam-jam untuk bisa melakukan transaksi.</p> <p>Rekaman Suara Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan Rekaman Suara Himbauan Protokol Kesehatan</p> <p>Screen reader, bel darurat, video layanan bahasa isyarat, media braille, alat bantu dengar, audio posbakum</p>
6	Pengadilan Negeri Padang Panjang	a. Aplikasi SiMonev APM (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu)	Aplikasi SiMonev APM (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu) adalah Aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk memantau/memonitor, mengevaluasi dan mendokumentasikan dokumen, bukti dan data pendukung Pelaksanaan dan Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Padang Panjang.

		<p>b. SiBola adalah Sistem Informasi Brosur Layanan</p> <p>c. Si-Salut (Sistem Informasi Permintaan Salinan Putusan)</p>	<p>Yaitu sebuah layanan yang menyediakan brosur elektronik tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang meliputi pelayanan Pelayanan pidana, perdata, hukum, e-Court, e-raterang, Gugatan Sederhana, Mediasi, Posbakum, SiSari dan Alur Pelayanan Disabilitas. Dengan SiBola ini diharapkan dapat memberikan akses kemudahan informasi untuk masyarakat pencari layanan tentang pelayanan yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.</p> <p>Layanan permintaan salinan putusan ini merupakan sebuah inovasi dari Pengadilan Negeri Padang Panjang yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, dengan layanan ini masyarakat pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan permohonan permintaan salinan putusan, cukup dengan mengisi formulir elektronik yang telah tersedia. Masyarakat pencari</p>
--	--	--	--

			keadilan hanya datang ke pengadilan negeri ketika salinan putusan telah siap untuk diserahkan.
		d. Siap Banthu (Sistem Informasi Bantuan Hukum)	Inovasi berupa aplikasi yang dinamakan dengan Siap Banthu ini merupakan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan ganti nama dan mengajukan permohonan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya pemohon pada saat datang ke Pengadilan Negeri Padang Panjang cukup mengisi permohonan ganti nama dan permohonan bantuan hukum menggunakan aplikasi SiapBanthu menggunakan komputer yang telah tersedia, sehingga pemohon tidak perlu lagi melakukan pengisian permohonan secara manual.
		e. Form Pelayanan Digital Dan Video Persyaratan Ganti Nama	Layanan ini merupakan inovasi yang memudahkan kelompok disabilitas dalam mencari informasi tentang persyaratan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya pemohon dapat mengetahui

			<p>mengenai persyaratan permohonan ganti nama cukup dengan mengakses website dan media sosial yang ada pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Selain itu pemohon dapat mengunduh form pernyataan dan form permohonan ganti nama yang telah disediakan pada Website Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang nantinya memudahkan pemohon untuk dapat mengisi langsung form permohonan dan form pernyataan tersebut di mana pun dan kapan pun sehingga pada saat pengajuan permohonan semua persyaratan telah terpenuhi oleh Pemohon.</p>
		<p>f. Buku Standar Operasional Prosedur Pelayanan Menggunakan Huruf Braille</p>	<p>Inovasi ini merupakan sarana untuk memudahkan kelompok disabilitas khususnya penyandang tuna netra dalam membaca dan mengetahui standar operasional prosedur pelayan yang ada pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya penyandang tuna netra dapat mengetahui seluruh layanan yang ada seperti layanan Perdata, Pidana, dan Hukum menggunakan buku SOP yang telah dilengkapi huruf Braille.</p>

		g. Form Pelayanan Digital Dan Video Tutorial Tata Cara Pelayanan Dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum	Inovasi ini merupakan sarana yang memudahkan masyarakat pencari keadilan yang akan mengakses layanan bantuan hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Padang Panjang. Nantinya masyarakat yang ingin mengetahui persyaratan dan tata cara pelayanan pada posbakum cukup dengan melihat video tutorial pelayanan dan tata cara persyaratan posbakum yang pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang. Selain itu masyarakat juga bisa mengunduh formulir pelayanan posbakum pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang.
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	<p>a. MInt SIPP (Monitoring Internal - Sistem Informasi Penelusuran Perkara)</p> <p>b. MExt SIPP (Monitoring External - Sistem</p>	<p>Aplikasi MInt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk tenaga teknis dan bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri, Terkhusus lagi untuk Hakim, Panitera dan Jurusita serta tenaga non teknis pengadilan yang mempunyai hak akses pada aplikasi SIPP lokal pengadilan.</p> <p>Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk</p>

		Informasi Penelusuran Perkara)	para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum.
8	Pengadilan Negeri Solok	<p>a. Brosur Elektronik</p> <p>b. Kartu Prioritas</p> <p>c. E-DEPE (Delivery Penetapan)</p>	<p>Merupakan alternatif brosur yang disediakan Pengadilan Negeri Solok dan mengurangi penggunaan kertas (<i>paperless</i>). Dampak langsung bagi layanan dengan adanya inovasi adalah pengguna layanan pengadilan dapat mengetahui jenis-jenis layanan Pengadilan Negeri Solok tanpa harus datang cukup dengan mengakses situs web Pengadilan Negeri Solok.</p> <p>Untuk pengguna layanan yang dilayani melewati waktu yang ditetapkan SOP. Kartu ini merupakan kompensasi untuk pengguna layanan. Sehingga pada pelayanan berikutnya pengguna layanan menjadi prioritas untuk dilayani.</p> <p>Merupakan aplikasi pengiriman penetapan tentang perubahan nama/akta kelahiran, akta kematian, dan akta cerai setelah penetapan dibacakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan</p>

			<p>Sipil Kota solok pada hari yang sama. Inovasi ini dilatarbelakangi agar masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan lebih cepat. Masyarakat tidak perlu mengurus ke Disdukcapil karena dokumen langsung diproses dan dokumen elektronik dapat diunduh melalui tautan yang dikirimkan melalui SMS ke telepon genggam yang bersangkutan.</p>
9	<p>Pengadilan Negeri Lubuk Basung</p>	<p>a. Ruang Sidang Modern</p>	<p>Ruang Sidang Modern ini ditujukan untuk mempermudah persidangan melalui video telekonferensi. Dalam ruang sidang ini terdapat videowall sebagai layar utama dengan layar monitor berukuran masing-masing 65 inch. Di Depan meja Majelis Hakim, terdapat sebuah komputer operator yang dilengkapi dengan peralatan pendukung audio visual. Selain itu, ruang sidang ini juga telah dilengkapi dengan satu buah kamera beresolusi tinggi yang dapat diputar 180 derajat untuk mengambil gambar situasi dalam ruang sidang. Ruang Sidang Modern ini terletak pada ruang sidang Utama.</p>

		<p>b. Aplikasi E-Tilang</p> <p>c. Aplikasi Panggilan Sidang (Pangsid)</p> <p>d. Aplikasi antrian PTSP</p> <p>e. Aplikasi Posbakum Online</p>	<p>Aplikasi ini ditujukan untuk Pelanggar Lalu-Lintas. Dengan e-Tilang ini, Pelanggar dengan mudah dapat mengetahui besaran Denda Tilang yang telah diputus oleh Hakim. Dengan versi terbaru sekarang, Pelanggar cukup memindai batang kode tilang, tanpa perlu lagi mengetik nomor tilang atau nama atau nomor polisi kendaraannya, maka aplikasi akan menampilkan hasilnya.</p> <p>Aplikasi ini adalah Aplikasi yang di gunakan untuk Panggilan sidang bagi Para Pihak yang berpekara.</p> <p>Aplikasi yang memudahkan Pengunjung PTSP untuk mendapatkan layanan yang Prima</p>
10	Pengadilan Negeri Padang	a. Sistem Permohonan Izin /Persetujuan Terpadu (SPRINTER)	<p>Didalam praktek sehari-hari Pengadilan Negeri Padang sering mengalami hambatan dalam pengurusan permohonan atau persetujuan izin penyitaan diantaranya adalah kekurangan syarat-syarat untuk dapat disetujuinya penerbitan surat penetapan persetujuan izin</p>

		<p>b. Mobile SIPP (MInt SIPP dan MExt SIPP)</p> <p>c. Pengembalian Sisa Panjar Otomatis</p>	<p>penyitaan. Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang maka hal ini menjadi kendala dalam penerbitan surat penetapan persetujuan izin penyitaan dan akan bermuara pada lambatnya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.</p> <p>Pengadilan Negeri Padang menyediakan layanan akses ke SIPP melalui aplikasi Mint SIPP untuk aparaturnya PN Padang dan Mext SIPP untuk masyarakat pencari keadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat memantau perkembangan perkara di Pengadilan Negeri Padang melalui perangkat ponsel android mereka.</p> <p>Salah satu inovasi layanan lain dari Pengadilan Negeri Padang adalah melaksanakan pengembalian sisa panjar otomatis ke rekening pihak pencari keadilan pada hari perkara diputus. Sistem ini diberikan khusus untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court dengan mengisikan nomor rekening tujuan untuk pengembalian sisa panjar. Dengan adanya sistem ini, pihak</p>
--	--	---	---

		<p>d. <i>One Day Service</i> Perkara Perdata Permohonan</p> <p>e. Rekaman Suara Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p>	<p>pen pencari keadilan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang sisa panjar perkara mereka.</p> <p>Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan <i>one day service</i> pada perkara Perdata Permohonan dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Dimana si pemohon dapat memperoleh salinan penetapan pada hari yang sama dengan hari sidang atau hari penetapan dibacakan. Untuk pendaftaran permohonan Ketua Pengadilan juga telah mewajibkan pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi ecourt sehingga tercipta prinsip peradilan yang cepat, transparan dan biaya ringan.</p> <p>Sehubungan dengan penerapan Zona Integritas dan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Padang, maka setiap satu jam sekali diputar rekaman suara pengumuman penerapan SMAP di semua ruangan gedung Pengadilan Negeri</p>
--	--	---	---

		<p>f. Rekaman Suara Himbauan Protokol Kesehatan</p> <p>g. Pembacaan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Sidang Pertama</p>	<p>Padang yang dapat didengar oleh semua aparaturnya peradilan dan masyarakat.</p> <p>Dalam pengumuman tersebut diberitahukan bahwa semua layanan Pengadilan Negeri Padang bebas suap, pungutan liar, dan gratifikasi.</p> <p>Sehubungan dengan adanya program dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus covid 19 di Sumatera Barat, untuk itu Pengadilan Negeri Padang menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5R. Maka setiap satu jam sekali diputar rekaman suara pengumuman himbauan protokol kesehatan di semua ruangan gedung Pengadilan Negeri Padang yang dapat didengar oleh semua aparaturnya peradilan dan masyarakat.</p> <p>Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah pembacaan penerapan SMAP dihadapan para pihak yang berperkara pada sidang</p>
--	--	---	---

		<p>h. Penulisan Bebas Pungli dan Gratifikasi Pada Semua Produk PN Padang</p> <p>i. Aplikasi Sistem Pelayanan PTSP Jarak Jauh (SIPATUAH)</p>	<p>pertama oleh majelis hakim. Pembacaan penerapan SMAP ini juga ikut dituliskan pada berita acara sidang oleh Panitera Pengganti.</p> <p>Inovasi lain yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah penulisan bebas pungli dan gratifikasi pada semua Produk Pengadilan Negeri Padang, seperti surat keterangan, perjanjian kerjasama, surat perintah kerja, dan lain-lain.</p> <p>Dalam aplikasi Sipatuah, merupakan media elektronik untuk memudahkan dan mempercepat dalam memberikan pelayanan secara online. Layanan yang tersedia diantaranya permohonan salinan atau petikan putusan, permohonan fotocopy salinan putusan, permohonan legalisir fotocopy turunan putusan, permohonan penelitian, riset, atau magang, serta layanan terima surat online. Masyarakat cukup mengajukan permohonan secara</p>
--	--	---	---

		<p>online dan datang ke PTSP PN Padang untuk mengambil produk layanan.</p> <p>j. Aplikasi Sistem Kerjasama Pelayanan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan Online (SIJEMPOL)</p> <p>k. Sistem Informasi Register Antrian Sidang (SIRANDANG)</p> <p>l. Rekaman Audio Intruksi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung</p>	<p>Sijempol merupakan layanan yang memudahkan pendaftaran perkara dan permohonan surat keterangan secara online. Sistem ini juga menyediakan bantuan layanan berupa layanan zoom meeting agar masyarakat terhubung dan tatap muka dengan petugas Pengadilan Negeri Padang. Kendali perangkat juga dilengkapi pada sistem ini yang berguna sebagai layanan pengontrolan jarak jauh computer pengguna sijempol oleh petugas Pengadilan Negeri Padang.</p> <p>Sirandang merupakan system antrian sidang yang dapat membantu para pihak memantau alur antrian untuk perkara mereka. Sirandang juga dapat memberikan pesan suara apabila para pihak telah lengkap dan sidang dapat dimulai.</p> <p>Sehubungan dengan intruksi tersebut, Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengunduh audio intruksi Yang Mulia Ketua</p>
--	--	---	--

			Mahkamah Agung dan memutar audio intruksi tersebut pada setiap satuan kerja masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu. Sebelum audio diputar agar diawali dengan kata pengantar yang telah ditentukan.
11	Pengadilan Negeri Pariaman	<p>a. Aplikasi Sistem Rating Pelayanan (SiRana)</p> <p>b. Aplikasi Si Super</p>	<p>Aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan yang diterimanya. Setelah pengunjung selesai menerima layanan, petugas langsung mengarahkan untuk memberikan penilaian melalui aplikasi dengan cara memilih berapa banyak bintang sesuai dengan pendapatnya.</p> <p>Aplikasi si-Super atau adalah aplikasi survei yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner secara elektronik atau <i>e-kuesioner</i>. Survei yang dilakukan saat ini adalah Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi. Pembuatan e-kuesioner berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman</p>

		c. Aplikasi <i>e-Voice</i>	<p>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Aplikasi <i>e-Voice</i> adalah aplikasi untuk mengeluarkan suara elektronik seperti suara untuk panggilan rapat, panggilan apel, panggilan sidang, audio anti gratifikasi dan lain sebagainya.</p>
	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	<p>a. DIVA Integrated (Digital Virtual Asisten)</p> <p>b. Kerjasama pelayanan secara elektronik (Ksatrio Sirancak)</p> <p>c. Aplikasi Survey IPAK dan IKM berbasis Web</p>	<p>Aplikasi Autorespon (Penjawab Otomatis) Chat di Sosial media untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi perkara dan informasi lain khususnya di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, juga untuk internal Pengadilan Negeri Pasaman Barat.</p> <p>Aplikasi Kstario Sirancak adalah singkatan dari kerjasama pelayanan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi (Eraterang, E-Court, DIVA dan SIAK). Kerjasama tersebut adalah kerjasama yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.</p>

		<p>d. Website Ramah Diffabel</p>	<p>Aplikasi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis Web. Kedua aplikasi survey ini diletakan di website Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga masyarakat yang ingin memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat langsung memberikan penilaiannya melalui gadget masing-masing tanpa harus mengantri untuk menggunakan aplikasi yang telah diinstallkan di komputer yang disediakan.</p> <p>Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga melakukan inovasi dengan membuat Website Ramah Diffabel. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pencari keadilan yang memiliki kekurangan juga dapat mencari informasi yang mereka butuhkan di Website Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanpa harus datang langsung bertanya ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hal ini juga menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh.</p>
--	--	----------------------------------	--

			<p>Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.</p> <p>Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.</p>
14	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	<p>a. Aplikasi Panggilan Sidang</p> <p>b. Social Feed</p>	<p>Aplikasi Panggilan Sidang beserta perangkat Audio untuk menunjang aplikasi Panggilan Sidang, agar masyarakat umum, jaksa dan pengacara bisa mengetahui ketika mereka dipanggil.</p> <p>Fasilitas <i>social media</i> yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mempermudah penyampaian informasi pelayanan publik yang terdapat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. <i>Social media</i> yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah Facebook, Instagram dan Youtube.</p>

		<p>c. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> <p>d. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sebelumnya dilakukan secara manual</p> <p>e. Survey Harian secara elektronik</p> <p>f. Pojok E-court</p> <p>g. Portal Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> <p>h. Audio Peringatan Anti Gratifikasi</p> <p>i. Loker Disabilitas</p> <p>j. Aplikasi Simpel (Sistem Informasi Pelayanan)</p>	<p>Suatu layanan survey yang tersedia untuk mengetahui kinerja pelayanan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Suatu layanan survey yang tersedia untuk mengetahui kinerja pelayanan harian pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p>
15	Pengadilan Negeri Painan	a. Audio Peringatan Anti Gratifikasi	

		Pengadilan Negeri Painan b. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Painan c. Shortcut Hotspot Pengadilan Negeri Painan Untuk Internal d. Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Painan e. Halaman Log In Khusus Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Tampilan Layar Televisi Informasi Pengadilan Negeri Painan g. Tampilan Layar Antrian Pelayanan Terpadu Satu	
--	--	--	--

		<p>Pintu Untuk Pengunjung</p> <p>h. Short Message Servis Center Pengadilan Negeri Painan</p> <p>i. Aplikasi Panggilan Sidang pengadilan Negeri Painan</p> <p>j. Landing Page & Informasi Cepat Pengadilan Negeri Painan</p> <p>k. Whatsapp Business Pengadilan Negeri Painan</p> <p>l. Survey Ikm Dan Ipk Menggunakan Kios K</p> <p>m. Sidang Online Menggunakan Telecnference</p>	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Aplikasi Dashboard Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Aplikasi dashboard ini akan menampilkan rasio penanganan perkara yang berasal dari proses penanganan perkara di SIPP. Inovasi ini memudahkan hakim dan panitera pengganti dalam

			<p>melakukan kontrol terhadap proses perkara yang sedang dalam persidangan.</p> <p>Selain itu pada tampilan dashboard juga terdapat menu atau shorcut untuk mengakses jadwal sidang dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung.</p>
--	--	--	---

BAB VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap kinerja baik dalam bidang Yustisial maupun Non Yustisial dilaksanakan dengan seksama dan wajar yang berpedoman pada asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan pengawasan baik dalam bidang teknis maupun bidang administrasi yang meliputi :

1. Metode Pengawasan

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI (*voorpost*), Ketua Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan menggunakan Metode Pengawasan yang dilakukan antara lain :

- a. Inspeksi secara rutin dan mendadak hal ini dilakukan terhadap administrasi keuangan maupun administrasi perkara.
- b. Meminta laporan secara periodik (berkala) terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan melalui Hakim Pengawas Daerah yang meliputi bidang Teknis Yustisial yaitu bidang Kepaniteraan dan Kejurusitaan serta keuangan perkara, selain itu juga Hakim Pengawas Bidang Juga bertugas melakukan pengawasan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Umum dan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- c. Laporan khusus diminta jika ada masalah tertentu yang perlu penyelesaian segera atau mendapatkan hal-hal yang baru dan perlu pemecahan.

2. Pengawasan Secara Berkala

Selain hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan penilaian khusus kepada Hakim, Panitera dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pengadilan Tinggi Padang setiap tahunnya melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Hal ini dilakukan tiap-tiap akhir tahun khusus untuk hakim penilaian dilakukan di dalam dinas maupun di luar kedinasan hal ini untuk menjaga dan meningkatkan citra hakim di mata publik.

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *Preventif* dan *Represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu. Pengawasan secara

internal pada Pengadilan Tinggi Padang secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP.
5. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan dan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang telah dilakukan secara periodik oleh Pengadilan Tinggi Padang yang dalam kurun waktu Tahun 2022.

**REKAP HASIL PENGAWASAN SEMESTER I PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET.
1.	PN PADANG	15/08/2022 s.d 16/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim bertanggungjawab terhadap minutasi tetapi masih ada minutasi perkara yang tidak tepat waktu. 2. Belum seluruh berita acara sidang diparaf dan ditandatangani. 3. Belum ada jadwal pengawasan, belum ada bukti laporan pengawasan bidang, belum dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindaklanjutnya. 4. Sekretaris belum melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan, belum dilakukan monev dan tindaklanjutnya. 5. Pengadaan barang dan 	30/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengadilan Negeri Padang akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap para hakim yang masih tidak tepat dalam melakukan minutasi perkara. 2. Ketua Majelis dibantu dengan Panitera Pengganti bertanggungjawab terhadap kelengkapan paraf dan tandatangan di setiap berita acara siding. 3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Pengawas Bidang dan melakukan monev terhadap pengawasan yang dilakukan. 4. Sekretaris menyusun jadwal rapat evaluasi anggaran. 5. Sekretaris melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri 	

			jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN) belum di monev.		Padang.	
2.	PN PARIAMAN	08/08/2022 s.d 09/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak Panitera Pengganti yang tidak membuat Berita Acara Sidang. 2. Belum ada Surat Keputusan tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum serta belum dilakukan monitoring pelaksanaan. 3. Belum semua Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB diberi label barang. 4. Terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua, sehingga dikenakan denda keterlambatan. 5. File Hakim / Pegawai 	10/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Berita Acara Sidang, semuanya sudah dibuat dan sudah diinput ke aplikasi SIPP. 2. Sudah membuat SK tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum dan sudah dilakukan monitoring. 3. Sekretaris telah melakukan pengawasan terhadap pemberian labelisasi Barang Milik Negara dan sudah semua barang diberikan labelisasi. 4. Memang terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua, sehingga dikenakan denda keterlambatan. Denda keterlambatan tidak dibebankan kepada DIPA, tetapi dibebankan kepada pemakai kendaraan. Ke depan dipastikan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran 	

			belum disusun dengan tertib, dan bentuk serta warna boxfile belum seragam.		pajak kendaraan. 5. File Hakim/Pegawai sudah disusun dengan tertib, dan bentuk serta warna box sudah diseragamkan.	
3.	PN PAINAN	12/07/2022 s.d 13/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan monitoring terhadap SOP Kepaniteraan. 2. Court Kalender dalam berkas perkara belum dibubuhi tanggal. 3. Pengadilan Negeri belum melakukan monev terhadap template putusan. 4. Arsip kepegawaian memerlukan lemari besi yang memadai dan aman. 5. Belum semua ada kartu control untuk pemeliharaan BMN 	26/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan monitoring terhadap SOP Kepaniteraan yang dilakukan Kepaniteraan. 2. Panitera pengganti memeriksa semua berkas perkara yang court kalendernya belum dibubuhi tanggal dan langsung memberikan tanggal. 3. Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim dan Para Panitera Pengganti telah melakukan monev terhadap template putusan. 4. Sekretaris akan mengajukan anggaran biaya tambahan untuk melakukan pembelian lemari arsip untuk kepegawaian. 5. Kartu control pemeliharaan BMN sudah dipasang semuanya. 	
4.	PN SOLOK	22/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dicantumkan penomoran dalam 	12/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera telah melakukan pengawasan dalam 	

		s.d 23/06/2022	<p>kuitansi Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Badilum. 3. Belum seluruh BMN dilabelisasi. 4. Papan informasi belum ada. 5. Izin keluar kantor telah tercatat pada Surat Izin Keluar Kantor, akan tetapi pada surat izin tersebut tidak menjelaskan batas waktu izin. 		<p>pencantuman penomoran dalam kuitansi surat kuasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Pengadilan telah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan. 3. Sekretaris telah melakukan pengawasan terhadap pemberian labelisasi BMN. 4. Telah dibuat papan informasi. 5. Sekretaris telah melakukan pengawasan langsung terhadap pemberian batas waktu surat izin keluar kantor. 	
5.	PN KOTO BARU	14/07/2022 s.d 15/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis hakim setiap bulannya belum melakukan monitoring terhadap publikasi seluruh putusannya di Direktori Putusan. 2. Belum dilakukan monitoring terhadap anomisasi putusan yang dipublikasi di Direktori Putusan. 	29/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan monev terhadap publikasi putusan di Direktori Putusan. 2. Telah dilakukan monev anomisasi putusan di Direktori Putusan. 3. Telah dilakukan monev hasil pengawasan bidang. 4. Telah dilakukan monev SOP kepaniteraan. 5. Telah dibuatkan eviden monev 	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum melakukan monev tindak lanjut hasil pengawasan bidang. 4. Belum melakukan monev SOP Kepaniteraan. 5. Belum ada eviden monev rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tiap bulan kepada KPN. 		<p>rapat evaluasi anggaran dan telah melaporkan realisasi anggaran kepada Ketua Pengadilan.</p>	
6.	PN PADANG PANJANG	04/07/2022 s.d 05/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua Hakim melakukan pengawasan bidang setiap minggu. 2. Belum melaksanakan monitoring SOP Kepaniteraan. 3. Belum melaksanakan monev terhadap template putusan. 4. Jalur evakuasi dan titik kumpul belum disosialisasikan. 5. Dokumen rencana kebutuhan pegawai (bezzetting) tidak ada. 	12/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan monitoring oleh Ketua agar Hakim melakukan pengawasan setiap minggu. 2. Telah dilakukan monitoring SOP oleh bagian kepaniteraan. 3. Telah dilakukan monev template putusan oleh bagian Kepaniteraan. 4. Telah dilakukan sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul. 5. Telah dibuat bezzetting oleh bagian Kepegawaian. 	

7.	PN BATUSANGKA R	20/06/2022 s.d 21/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada penggunaan aplikasi pencatatan surat masuk/keluar di Kepaniteraan Pidana dan Perdata. 2. SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Dirjen Badilum belum di monitoring. 3. Satker belum melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sehingga BMN dengan kondisi rusak berat menumpuk di Gudang. 	27/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan surat masuk dan keluar pada Kepaniteraan Perdata dan Pidana sudah memakai aplikasi. 2. Bagian Kepaniteraan melakukan monitoring terhadap SOP. 3. Melakukan penghapusan BMN 	
8.	PN BUKITTINGGI	27/06/2022 s.d 28/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara sudah di tandatangani tetapi belum di paraf di setiap halamannya. 2. Monev terhadap publikasi putusan di Direktori Putusan sudah dilakukan tetapi belum dilakukan tindak lanjut. 3. Masih ada penyerahan berkas perkara in active dari Panitera Pengganti kepada Panmud 	11/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Hakim melakukan pengecekan paraf di setiap lembar putusan perkara. 2. Membuat tindaklanjut dari monev direktori putusan. 3. Penyerahan berkas perkara in active ke Panmud Perdata dalam 3 hari. 4. Melakukan monev SOP Kepegawaian 5. Melakukan update nilai HSBGN per wilayah. 	

			<p>Perdata untuk miutasi lebih dari 3 hari setelah putus perkara.</p> <p>4. Belum ada monev terhadap SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>5. Nilai HSBGN (Harga Satuan Bagunan Gedung Negara) per wilayah belum di update.</p>			
9.	PN LUBUK BASUNG	06/07/2022 s.d 07/07/2022	<p>1. SOP Kepaniteraan yang digunakan belum SOP dari Ditjen Badilum.</p> <p>2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tidak diberi nomor.</p> <p>3. Kelengkapan berkas banding sebagian besar dikirim ke Pengadilan Tinggi sudah melewati 14 hari (236 KUHAP).</p> <p>4. Pelaksanaan absensi belum di monev secara berkala.</p> <p>5. PBB rumah dinas belum dibayar karena IMB</p>	13/07/2022	<p>1. Menggunakan SOP Kepaniteraan dari Ditjen Badilum.</p> <p>2. Memberi nomor SKUM.</p> <p>3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengiriman berkas banding.</p> <p>4. Hakim pengawas bidang melakukan monev terhadap pelaksanaan absensi.</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan BPN terkait IMB rumah dinas.</p>	

			rumah dinas belum ada.			
10.	PN PAYAKUMBUH	14/07/2022 s.d 15/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada SOP tentang upaya hukum kasasi dan PK dengan dokumen elektronik. 2. SK Ketua Pengadilan Negeri tentang penetapan biaya proses dan SK kpn tentang penunjukan pengelola biaya proses belum ada. 3. Belum tersedia ruang penasehat hukum. 4. Absensi manual belum digaris merah oleh petugas absensi. 5. Izin belajar belum dilaksanakan sesuai prosedur. 	22/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SOP upaya hukum kasasi dan PK. 2. Membuat SK Ketua tentang penetapan biaya proses dan penunjukan pengelola biaya proses.\ 3. Menyediakan ruang penasehat hukum. 4. Petugas absensi menggaris merah absen manual. 5. Melaksanakan izin belajar sesuai prosedur yang berlaku. 	
11.	PN MUARO	20/07/2022 s.d 21/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim pengawas bidang belum melakukan pengawasan setiap minggu. 2. SK Ketua Pengadilan tentang penetapan biaya proses dan penunjukan pengelola biaya proses belum ada. 	03/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan seminggu sekali. 2. Ketua Pengadilan Negeri membuat SK tentang penetapan biaya proses dan penunjukan pengelola biaya proses. 3. Melakukan monev SOP bagian 	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Monev implementasi SOP bagian umum dan keuangan belum dilakukan. 4. Dokumen serah terima barang belum ditandatangani oleh masing-masing pihak. 5. Belum ada laporan pencatatan asset lainnya dari tim penilai kepada Kuasa Pengguna Barang. 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menandatangani dokumen serah terima barang dari masing-masing pihak. 5. Membuat laporan kepada KPB tentang pencatatan asset. 	
12.	PN SAWAHLUNTO	12/07/2022 s.d 13/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev tentang penomoran perkara dan template putusan belum dilaksanakan. 2. Panitera Muda Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap tahun. 3. Jalur evakuasi dan titik kumpul belum disosialisasikan. 4. Uraian tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan belum di monitoring. 	21/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monev penomoran perkara dan template putusan. 2. Panmud hokum melakukan evaluasi terhadap kinerja posbakum. 3. Melakukan sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul. 4. Melakukan monitoring uraian tugas bagian Umum dan Keuangan. 	

13.	PN TANUNG PATI	07/07/2022 s.d 08/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari arsip belum diberikan label sesuai berkasnya. 2. Belum seluruh permohonan eksekusi terdata di SIPP. 3. Belum tersedia genset yang memadai untuk kebutuhan kantor. 4. Belum ada monitor cctv di ruang Ketua Pengadilan Negeri. 5. Data di SIKEP belum lengkap. 	18/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi label di lemari arsip. 2. Menyisir pendataan permohonan eksekusi di SIPP. 3. Membuat permohonan anggaran tambahan untuk belanja modal genset. 4. Membuat permohonan penambahan anggaran untuk belanj modal monitor cctv. 5. Melengkapi data SIKEP. 	
14.	PN LUBUK SIKAPING	21/07/2022 s.d 22/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat uang pihak ketiga tidak disimpan ke dalam brankas, tetapi hanya disimpan di laci kasir. 2. Tidak ada tanda ditahan atau tidak ditahan pada sampul berkas kasasi yang menunjukkan bahwa terdakwa ditahan. 3. Tidak semua pegawai di bagian kepegawaian memiliki uraian tugas pada meja masing- 	01/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan terhadap penyimpanan uang pihak ketiga. 2. Memberikan tanda ditahan atau tidak ditahan pada sampul berkas perkara kasasi. 3. Membuat uraian tugas di atas meja masing-masing. 4. Membuat izin keluar kantor sesuai SK KMA Nomor 071/KMA/V/2008. 5. Hakim pengawas bidang melakukan monitoring terhadap bagian umum dan 	

			<p>masing.</p> <p>4. Izin keluar kantor tidak sesuai dengan SK KMA 071/KMA/V/2008.</p> <p>5. Terlambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan roda dua, sehingga menimbulkan denda.</p>		<p>keuangan agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran pajak.</p>	
15.	PN PASAMAN BARAT	02/08/2022 s.d 03/08/2022	<p>1. SOP Kepaniteraan belum menggunakan SOP dari Dirjen Badilum.</p> <p>2. Hakim Pengawas Bidang belum melakukan pengawasan setiap minggu.</p> <p>3. Belum melakukan monev keseluruhan terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP.</p> <p>4. SK KPN tentang penunjukan pengelola biaya proses belum ada.</p> <p>5. Uraian tugas di sub bagian perencanaan,</p>	04/08/2022	<p>1. Menggunakan SOP Kepaniteraan yang telah diterbitkan oleh Ditjen Badan Peradilan Umum.</p> <p>2. Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan bidang setiap minggu.</p> <p>3. Melakukan monev terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP.</p> <p>4. Membuat SK KPN tentang penunjukan pengelola biaya proses.</p> <p>5. Membuat uraian tugas di sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.</p>	

			teknologi informasi dan pelaporan belum dibuat.			
16.	PN PULAU PUNJUNG	25/07/2022 s.d 26/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan monitoring SOP Kepaniteraan. 2. Belum ada SK KPN tentang penetapan biaya proses dan SK KPN tentang penunjukan pengelola biaya proses. 3. Izin keluar kantor belum sesuai dengan SK KMA Nomor 071/KMA/V/2008. 4. Belum seluruh Barang Milik Negara diberi label. 5. Satker belum melakukan rekon internal antara aplikasi Simak BMN, SAIBA setiap bulannya. 	05/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian kepaniteraan melakukan monitoring SOP. 2. Membuat SK KPN tentang penetapan biaya proses dan tentang penunjukan pengelola biaya proses. 3. Membuat izin keluar kantor sesuai dengan SK KMA Nomor 071/SK/KMA/V/2008. 4. Memberi label semua Barang Milik Negara. 5. Melakukan rekon internal antara aplikasi Simak BMN dan SAIBA setiap bulannya. 	

**REKAP HASIL PENGAWASAN SEMESTER II PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET.
1.	PN PADANG	28/11/2022 s.d 29/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 23 perkara yang belum upload putusan ke SIPP. 2. Terdapat 32 perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. 3. Pengadilan Negeri belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum. 4. Belum lengkap menginput pertanggung jawaban DIPA 01 dan 03 pada aplikasi E-Bima. 5. Pengisian aplikasi PTSP+ pada surat masuk dan surat keluar belum tuntas. 6. Ada rumah dinas yang masih ditempati oleh pejabat yang telah mutase dari PN Padang. 	05/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim pengawas bidang melakukan pemeriksaan dan petugas segera melakukan upload putusan ke SIPP. 2. Hakim pengawas bidang melakukan pengecekan terhadap perkara yang sudah putus tapi belum minutasi. 3. Menetapkan SK KPN tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan dari Ditjen Badilum. 4. Melakukan penginputan pertanggungjawaban DIPA 01 dan DIPA 03 pada aplikasi E-Bima. 5. Melakukan pengisian surat masuk dan surat keluar di aplikasi PTSP+. 6. Mengembalikan fungsi rumah dinas sesuai dengan peruntukannya. 7. Melakukan implementasi aplikasi JDIH versi 2.0. 	

			7. Belum mengimplementasikan aplikasi JDIH versi 2.0			
2.	PN PARIAMAN	08/12/2022 s.d 09/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perkara yang terlambat mengirimkan berkas permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. 2. Belum ada tanggal penandatanganan court calendar dalam perkara perdata. 3. Belum melaksanakan monev template putusan. 4. Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana belum melakukan monev SOP. 5. Belum ada laporan pencatatan asset tentang kondisi BMN dari tim penilai kepada Kuasa Pengguna Barang. 	16/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim pengawas bidang melakukan pemeriksaan terhadap keterlambatan pengiriman berkas banding dan akan melakukan pemantauan untuk selanjutnya. 2. Panitera Muda Perdata melakukan pengecekan terhadap tanda tangan di court calendar. 3. Bagian kepaniteraan melakukan monev terhadap template putusan. 4. Melakukan monev SOP di bagian kepegawaian. 5. Membuat laporan pencatatan asset dan melaporkannya ke Kuasa Pengguna Anggaran. 	
3.	PN PAINAN	31/10/2022 s.d	1. Penerbitan SKUM belum dilaksanakan	08/12/2022	1. Menerbitkan SKUM sesuai dengan instruksi Dirjen	

		01/11/2022	<p>sesuai instruksi Dirjen Badilum.</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan yang diterbitkan Dirjen Badilum belum dilaksanakan secara maksimal. Pengadilan Negeri belum melakukan monev penomoran perkara dan template putusan dalam perkara pidana dan perdata. Izin keluar kantor belum sesuai peruntukannya. Belum ada sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul. 		<p>Badilum.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan SOP Kepaniteraan yang diterbitkan oleh Ditjen Badilum. Melakukan monev penomoran perkara dan template putusan. Format izin keluar kantor dipisahkan antara yang punya Hakim dan yang punya pegawai. Melakukan sosialisasi tentang jalur evakuasi dan titik kumpul. 	
4.	PN SOLOK	05/12/2022 s.d 06/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat beberapa perkara yang belum upload Berita Acara sidang di SIPP. Belum ada paraf Ketua Pengadilan pada buku jurnal keuangan perkara Perdata Permohonan Eksekusi. Lemari arsip tidak mencukup sehingga arsip bertumpuk di 	20/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan upload berita acara sidang. Ketua Pengadilan Negeri memaraf buku jurnal keuangan perkara Perdata. Sekretaris membuat usulan permintaan anggaran tambahan untuk belanja lemari arsip. Sekretaris membuat rencana anggaran biaya untuk membuat ruangan penasehat 	

			<p>ruang sekretaris.</p> <p>4. Ruang penasehat hukum belum ada.</p> <p>5. AC di ruang server masih 1 (satu) unit.</p>		<p>hukum.</p> <p>5. Sekretaris membuat usulan anggaran tambahan untuk pembelian AC.</p>	
5.	PN KOTO BARU	07/11/2022 s.d 08/11/2022	<p>1. Sarana dan prasarana di ruangan Panitera kurang seperti brankas dan computer tidak ada.</p> <p>2. SK Ketua Pengadilan tentang penetapan biaya proses belum ada.</p> <p>3. SK Ketua Pengadilan tentang penunjukan pengelola biaya proses belum ada.</p> <p>4. Pengelolaan data SIKEP belum lengkap.</p> <p>5. Penginputan surat masuk dan surat keluar pada aplikasi PTSP belum tuntas.</p>	21/11/2022	<p>1. Sekretaris membuat usulan anggaran tambahan untuk melengkapi sarpras diruang Panitera.</p> <p>2. Membuat SK tentang biaya proses.</p> <p>3. Membuat SK tentang penunjukan pengelola biaya proses.</p> <p>4. Melengkapi data SIKEP.</p> <p>5. Melengkapi data di aplikasi PTSP untuk surat masuk dan surat keluar.</p>	
6.	PN PADANG PANJANG	17/10/2022 s.d 18/10/2022	<p>1. Penomoran SKUM belum dilaksanakan sesuai intruksi dari Dirjen Badilum.</p> <p>2. Pembaruan SOP Kepaniteraan dari Dirjen Badilum beum</p>	01/11/2022	<p>1. Penomoran SKUM dilaksanakan sesuai instruksi Dirjen Badilum.</p> <p>2. Melaksanakan SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum.</p> <p>3. Melakukan momev penomoran</p>	

			<p>dilaksanakan dan dipedomani secara maksimal.</p> <p>3. Belum dibuat monev penomoran perkara dan template putusan dalam perkara perdata dan pidana.</p> <p>4. SOP Kepegawaian belum dimonev.</p> <p>5. Laporan BMN belum dibuat.</p>		<p>perkara dan template putusan.</p> <p>4. Melakukan monev SOP Kepegawaian.</p> <p>5. Membuat laproan BMN.</p>	
7.	PN BATUSANGKA R	05/12/2022 s.d 06/12/2022	<p>1. Buku register induk perkara pidana belum diisi secara tertib.</p> <p>2. SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Dirjen Badilum belum di monitoring.</p> <p>3. Belum lengkap menginput pertanggungjawaban DIPA 01 dan 03 pada aplikasi E-Bima.</p> <p>4. SOP Umum dan Keuangan belum update.</p>	20/12/2022	<p>1. Hakim pengawas pidana melakukan penertiban untuk pengisian buku register induk pidana.</p> <p>2. Melakukan monev SOP Kepaniteraan.</p> <p>3. Melakukan penginputan laporan pertanggungjawaban DIPA 01 dan 03 di E Bima.</p> <p>4. Melakukan update SOP Umum dan Keuangan.</p>	

8.	PN BUKITTINGGI	24/10/2022 s.d 25/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tugas kepaniteraan pidana secara keseluruhan belum ada. 2. KPN belum membuat SOP upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan dokumen elektronik. 3. Belum melakukan monev keakuratan waktu pengisian data pada SIPP. 4. Uraian tugas di bagian umum dan keuangan sudah ada di meja masing-masing tetapi belum terlihat secara keseluruhan. 5. Terdapat kendaraan roda dinas jabatan roda dua yang di SK kan atas nama panitera pengganti dan staf. 	08/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat uraian tugas lengkap di kepaniteraan pidana. 2. Membuat SOP upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. 3. Melakukan monev keakuratan waktu pengisian data pada SIPP. 4. Membuat uraian tugas di bagian umum dan keuangan. 5. Membuat SK kendaraan dinas roda dua sesuai dengan peruntukannya. 	
9.	PN LUBUK BASUNG	03/11/2022 s.d 04/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 19 perkara yang belum upload Berita Acara Sidang ke dalam SIPP. 2. PNBP panggilan sidang 	17/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upload BAS ke dalam SIPP. 2. Melakukan pemungutan PNBP panggilan sidang secara tepat waktu. 	

			<p>kepada pemohon tidak dipungut tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyetoran PNPB kepada bendaharawan penerima dilaksanakan tidak tepat waktu. 4. Pengisian izin keluar kantor tidak sesuai dengan PERMA 7 Tahun 2016. 5. Ditemukan kuitansi yang belum ditandatangani. 6. IMB tidak ada. 7. Penempatan DVR CCTV tidak pada tempatnya. 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan penyetoran PNPB kepada bendaharawan penerima tepat waktu. 4. Membuat izin keluar kantor sesuai dengan Perma 7 Tahun 2016. 5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemantauan terhadap penggunaan kuitansi. 6. Sekretaris berkoordinasi dengan instansi terkait untuk IMB Pengadilan. 7. DVR CCTV ditempatkan yang tepat dan dilakukan pengawasan oleh sekretaris. 	
10.	PN PAYAKUMBUH	10/11/2022 s.d 11/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin keluar kantor tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua. 3. Belum ada sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul. 4. Terdapat pengeluaran anggaran perjalanan 	25/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat izin keluar kantor yang sesuai dengan peraturan. 2. Hakim pengawas umum dan keuangan melakukan pemeriksaan dan pemantau agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran pajak. 3. Melakukan sosialisasi tentang jalur evakuasi dan titik kumpul. 4. Hakim pengawas bidang umum dan keuangan 	

			<p>dinas yang tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan.</p> <p>5. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan RKAKL belum terlihat.</p>		<p>melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan standar biaya masukan.</p> <p>5. Melakukan rapat penyusunan RKAKL dengan melibatkan seluruh komponen Pengadilan Negeri termasuk pimpinan.</p>	
11.	PN MUARO	31/10/2022 s.d 01/11/2022	<p>1. SK KPN tentang Penetapan Biaya Proses belum ada.</p> <p>2. Rencana penggunaan biaya proses belum dibuat oleh Panitera selaku pengelola biaya proses.</p> <p>3. Monev terhadap uraian tugas kepaniteraan perdata belum ada.</p> <p>4. Implementasi 5R masih belum terlaksana secara maksimal di kantor Pengadilan Negeri Muaro.</p> <p>5. Arsip kepegawaian Tahun 2022 belum dilakukan monev.</p>	15/11/2022	<p>1. Membuat SK KPN tentang penetapan biaya proses.</p> <p>2. Panitera membuat rencana penggunaan biaya proses.</p> <p>3. Melakukan monev uraian tugas kepaniteraan perdata.</p> <p>4. Memaksimalkan implementasi 5R.</p> <p>5. Melakukan monev tentang arsip kepegawaian.</p>	

12.	PN SAWAHLUNTO	10/11/2022 s.d 11/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK KPN tentang penetapan biaya proses belum ada. 2. SOP upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan dokumen elektronik belum ada. 3. Data pegawai pada aplikasi SIKEP belum di update. 4. Kartu control pemeliharaan BMN belum ada. 	25/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SK KPN tentang penetapan biaya proses. 2. Membuat SOP upaya hukum kasasi dan PK dengan dokumen elektronik. 3. Melakukan update data SIKEP. 4. Membuat kartu control pemeliharaan BMN. 	
13.	PN TANUNG PATI	24/10/2022 s.d 25/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari arsip pidana belum diberi label sesuai dengan isinya masing-masing. 2. Izin keluar kantor belum sesuai peruntukannya. 3. Terdapat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua, sehingga dikenakan denda keterlambatan. 	08/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi label pada lemari arsip pidana. 2. Membuat izin keluar kantor sesuai dengan peruntukannya. 3. Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan rutin ke bagian umum dan keuangan sehingga ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran. 	

14.	PN LUBUK SIKAPING	07/11/2022 s.d 08/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada SK Ketua Pengadilan tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan yang diterbitkan oleh Ditjen Badilum. 2. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan RKAKL belum terlihat. 3. Terdapat dokumen pengeluaran anggaran DIPA 01 dan 03 yang tidak ditandatangani oleh pengelola anggaran. 	22/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SK KPN tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan dari Ditjen Badilum. 2. Melakukan rapat pimpinan tentang penyusunan RKAKL. 3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pengeluaran anggaran. 4. 	
15.	PN PASAMAN BARAT	14/11/2022 s.d 15/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan monev terhadap pengembalian sisa panjar biaya perkara. 2. SK KPN tentang penetapan biaya proses belum ada. 3. Rencana penggunaan biaya proses belum dibuat oleh Panitera selaku pengelola biaya proses. 4. Belum ada revidi dan revisi SOP bagian 	29/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap pengembalian sisa panjar biaya perkara. 2. Membuat SK KPN tentang penetapan biaya proses. 3. Panitera membuat rencana penggunaan anggaran selaku pengelola biaya proses. 4. Melakukan monev SOP bagian Kepegawaian. 5. Melakukan monev terhadap kesesuaian kompetensi pegawai di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. 	

			kepegawaian,organisasi dan tata laksana. 5. Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi.			
16.	PN PULAU PUNJUNG	17/11/2022 s.d 18/11/2022	1. Pencatatan surat masuk dan keluar di Kepaniteraan Hukum belum tercatat dengan baik. 2. Di ruang arsip belum ada computer, AC dan APAR. 3. Terdapat pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	01/12/2022	1. Kepaniteraan hukum melakukan pencatatan surat masuk dan keluar dengan tertib. 2. Sekretaris membuat usulan tambahan anggaran untuk pembelian computer, AC dan APAR 3. Hakim Pengawas Bidang umum dan keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran anggaran.	

B. EVALUASI

Pengawasan lainnya dalam bentuk mengevaluasi kinerja melalui dokumen yang telah dilakukan kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, dimana dokumen yang dievaluasi adalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dokumen SAKIP terdiri dari IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan direviu setiap tahunnya, kemudian direncanakan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) dalam periodik 5 tahun yang juga dilakukan reviu setelahnya. Kemudian diturunkan menjadi RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan ditetapkan kembali menjadi PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), serta terakhir dilaporkan hasilnya dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021, dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL EVALUASI SAKIP SATKER

No	Pengadilan Negeri (PN)	NILAI PER KOMPONEN					Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Nilai (%)	
1.	PN Bukittinggi	23,1	23,4	12	18,75	77,25	BB
2.	PN Pasaman Barat	21,6	21	10,8	18,25	71,65	BB
3.	PN Padang	21	21	10,5	17,5	70	B
4.	PN Muaro	21	21	10,5	17,5	70	B
5.	PN Padang Panjang	21	21	10,5	17	69,5	B
6.	PN Kotobaru	20,01	21	10,5	17,5	69,1	B
7.	PN Sawahlunto	21,6	20,4	10,05	17	69,05	B
8.	PN Pariaman	18	21,9	11,55	17,5	68,95	B
9.	PN Lubuk Sikaping	20,1	21,9	10,1	16,8	68,8	B
10.	PN Tanjung Pati	21	20,4	10,5	16,25	68,15	B
11.	PN Payakumbuh	21	20,4	9,75	17	68,15	B
12.	PN Lubuk Basung	19,5	21	11,85	15,75	68,10	B
13.	PN Painan	19,5	20,4	10,05	17,5	67,45	B
14.	PN Solok	20,1	18	10,05	15	63,15	B
15.	PN Batusangkar	19,5	21	9,75	12,5	62,75	B
16.	PN Pulau Punjung	18	19,5	9,75	15	62,25	B

Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk perlu diadakan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk keselarasan data dengan dokumen SAKIP.

Dalam hal evaluasi bahwa Pengadilan Tinggi Padang melakukan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang setiap tahunnya, agar dapat dijadikan pedoman penilaian dalam hal pencapaian kinerja. Untuk mengevaluasi dokumen SAKIP tersebut, Pengadilan Tinggi Padang membentuk

tim evaluator dan pelaksanaan evaluasinya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:

- a. Perlu diadakan pelatihan tentang tata cara evaluasi kepada Pengadilan Tingkat Banding agar penilaian kinerja lebih optimal;
- b. Pelatihan pembuatan SAKIP agar melibatkan bagian teknis, sehingga tercipta keselarasan dalam pembuatan laporan;
- c. Perlu diberikan penghargaan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bagi nilai SAKIP-nya yang tertinggi, seperti penambahan anggaran perjalanan dinas sehingga menimbulkan motivasi lebih untuk membuat laporan yang terbaik;
- d. Perlu diadakan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Kinerja untuk keselarasan data dengan Dokumen SAKIP;

Demikian laporan hasil evaluasi dokumen SAKIP tersebut dimuat dalam Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi yang dikirimkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

BAB VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Padang berjalan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2022 dapat diselesaikan. Hal ini tertuang pada SIPP dalam penanganan perkara.
2. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Padang tahun 2022 dengan objek pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI, telah memberikan hasil yang lebih positif hal ini terbukti dengan peningkatan sumber daya dan efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.
4. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

B. SARAN

1. Untuk percepatan proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan juga didukung oleh dana yang tersedia dalam DIPA.
2. Untuk peningkatan terlaksananya administrasi kesekretariatan yang maksimal diperlukan personil yang cukup berimbang dengan beban kerja.
3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang terutama dalam hal keterbukaan informasi

4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.